



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

KOMITMEN MELAMPAUI TANTANGAN



2016
Laporan
Keberlanjutan



KOMITMEN MELAMPAUI TANTANGAN

LAPORAN KEBERLANJUTAN 2016
PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

Sektor industri kelapa sawit menghasilkan produk yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat dan sektor industri lainnya. Namun di sisi lain, sektor industri ini rentan terhadap risiko sosial dan lingkungan.

Memahami hal tersebut, perusahaan kami, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk, berkomitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan dan mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan usaha pada sektor industri kelapa sawit. Di samping itu, kami juga berupaya menempatkan diri di tengah masyarakat agar tumbuh bersama.

Sejak 28 November 2016, komitmen kami diperkuat oleh Kebijakan Keberlanjutan yang ditandatangani oleh Direksi. Hal ini mendorong semangat kami menjaga keseimbangan antara imbal hasil investasi, keberlanjutan ekonomi bagi penduduk setempat dan kelestarian alam.

Inilah komitmen kami melampaui tantangan keberlanjutan, yang disajikan dalam Laporan Keberlanjutan kami yang pertama.



3.306 Orang

Jumlah petani yang tumbuh bersama ANJ dengan skema inti-plasma manajemen satu atap



41.800,05 Hektare
(26,5% dari total HGU Inti & Plasma)

Jumlah luas lahan konservasi yang dikelola ANJ



USD **134.443.317**
Rp **1.820.092.505.097,05**

Pendapatan 2016, naik 6,7% dari pendapatan 2015



177.273 Ton

CPO yang diproduksi sepanjang 2016, turun 8,1% dari produksi sepanjang 2015

DAFTAR ISI

- 1 Capaian 2016
- 2 Daftar Isi
- 3 Sambutan Direktur Utama
- 7 Laporan Keberlanjutan 2016
- 12 Tata Nilai dan Kebijakan Keberlanjutan
- 15 Tentang PT Austindo Nusantara Jaya Tbk

31



PEDULI LINGKUNGAN LESTARI

- 32 Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati
- 36 Mengelola Lahan Gambut
- 38 Mengendalikan Hama
- 41 Mengelola dan Memanfaatkan Limbah
- 43 Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca

45



SEJAHTERA BAGI SEMUA

- 46 Merangkul Pemangku Kepentingan
- 50 Menerapkan *Free Prior Informed Consent*
- 52 Menghormati Hak Asasi Manusia
- 54 Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 59 Memperkuat Kemitraan
- 61 Memberdayakan Masyarakat

65



MENINGKATKAN KINERJA

- 66 Mekanisme Lacak Balik
- 69 Kinerja Produksi & Ekonomi

- 76 Emas Hijau di Bumi Cendrawasih
- 84 Referensi Silang Indeks Isi GRI G4
- 87 Lembar Umpan Balik

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA [G4-1]

Pemangku kepentingan kami yang terhormat,

Untuk pertama kalinya, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) menerbitkan Laporan Keberlanjutan, yang merupakan salah satu jalur komunikasi untuk menyampaikan kinerja keberlanjutan kami, serta salah satu bentuk komitmen kami terhadap pembangunan berkelanjutan. Untuk terbitan perdana ini, kami hanya melaporkan sektor usaha kami di bidang perkebunan kelapa sawit.

Isu Utama dan Strategi Keberlanjutan

Isu utama yang kami usung dalam laporan ini yaitu kinerja pengelolaan lingkungan, relasi dengan komunitas lokal, penerapan mekanisme lacak balik (*traceability*), sertifikasi lingkungan dan sosial, pencapaian ekonomi, serta kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Kami melihat seluruh isu utama tersebut relevan dan signifikan dengan situasi usaha kami, dan hal itu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan.

Sejak 2016, kami telah menyusun dan menandatangani Kebijakan Keberlanjutan sebagai komitmen untuk memperhatikan keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam menjalankan bisnis. Kebijakan tersebut menjadi landasan untuk menyusun berbagai strategi manajerial dan operasional menangani aspek keberlanjutan.

Strategi keberlanjutan kami tercermin pada praktik-praktik operasional kami. Penerapan *free, prior and informed consent* (FPIC) atau keputusan bebas didahulukan dan diinformasikan (KBDD), misalnya, menjadi landasan strategi untuk menyelesaikan isu tapal batas lahan dan ganti rugi serta dalam membina relasi dengan masyarakat lokal.

Kebijakan konservasi, *zero waste* dan *zero burning* menjadi panduan kami dalam mengelola limbah dan menjaga serta melestarikan lingkungan hidup. Perencanaan bisnis kami juga memperhatikan keberadaan lahan gambut dan kawasan nilai konservasi tinggi (NKT) atau *high conservation value* (HCV) di wilayah perkebunan, termasuk perkebunan di Sumatera Selatan dan Papua Barat yang berada pada tahap pengembangan.

Dalam hal sosial ekonomi, kami mengembangkan skema kemitraan inti-plasma yang dikelola satu atap sehingga kesejahteraan masyarakat sejalan dengan berkembangnya Perusahaan. Melalui strategi ini, kami juga memperkuat modal sosial di setiap wilayah perkebunan yang kami kelola.



Istini T. Siddharta
Direktur Utama

Aspek Politik: Moratorium, Pengurangan Deforestasi dan Kebijakan

Kami menyadari bahwa dinamika politik nasional dan global mempengaruhi sektor industri kelapa sawit. Wacana moratorium lahan kelapa sawit oleh Pemerintah Indonesia, misalnya menimbulkan ketidakpastian dan dapat berdampak negatif terhadap perkembangan sektor industri kelapa sawit.

Di dalam negeri, kami melihat pemerintah saat ini memiliki komitmen untuk mengurangi deforestasi dan memperhatikan kerusakan hutan dan lahan gambut, khususnya setelah terjadi insiden kebakaran hutan yang cukup besar pada 2015. Sejalan dengan hal tersebut, perusahaan kami telah melakukan pencegahan kebakaran dan pengawasan yang ketat terhadap titik api di sekitar wilayah perkebunan. Sesuai Kebijakan Keberlanjutan yang dikeluarkan pada 2016, perusahaan kami tidak melakukan pengembangan pada lahan gambut dan lahan basah.

Dalam aspek regulasi, perusahaan kelapa sawit seringkali menghadapi ketidakpastian rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan peraturan daerah yang berpotensi kontraproduktif terhadap sektor industri kelapa sawit. Kondisi ini merupakan risiko keberlanjutan yang perlu kami pantau dan antisipasi.

Aspek Ekonomi: Penurunan Permintaan dan Peningkatan Harga

Dalam aspek ekonomi, terjadi penurunan ekspor Indonesia sebesar 5% dari 26,4 juta ton pada 2015 menjadi 25,1 juta ton pada 2016. Hal ini terjadi karena program *biofuel* B-20 yang mulai berjalan dan permintaan global yang melemah pada semua negara tujuan utama ekspor Indonesia, yaitu India, Tiongkok dan Pakistan. Di sisi lain, permintaan *crude palm oil* (CPO) dari Amerika Serikat dan Uni Eropa justru mengalami kenaikan (*sumber: Refleksi Industri Kelapa Sawit 2016 dan Prospek 2017 oleh GAPKI*).

Penurunan permintaan terbesar yaitu sebesar 19% dari Cina atau turun dari 3,99 juta ton pada 2015 menjadi 3,23 juta ton pada 2016. Turunnya nilai ekspor ke Cina terjadi karena pengembangan program peternakan dan impor kedelai untuk pakan ternak yang meningkat. Melalui proses *crushing* kedelai, Cina mendapatkan pengganti minyak kelapa sawit.

Berlawanan dengan turunnya permintaan global, harga CPO di pasar internasional justru semakin meningkat. Harga rata-rata CPO mencapai USD 700 per ton pada 2016, naik 14% dari rata-rata USD614 per ton pada 2015. Bahkan menjelang akhir 2016, harga rata-rata CPO mencapai USD790 per ton, melebihi ambang batas bawah pengenaan bea keluar USD750 per ton. Dengan naiknya harga CPO, kami tetap memiliki pertumbuhan pendapatan yang positif pada 2016 meski produksi CPO kami mengalami penurunan sebagai akibat El Nino pada 2015.

Kinerja 2016: Target, Pencapaian dan Pembelajaran

Kami menilai kinerja dan pencapaian Perusahaan cukup memuaskan meski menghadapi tantangan yang berat pada 2016. Pendapatan Perusahaan meningkat 6,7% dan laba tercatat positif setelah tahun sebelumnya mengalami kerugian. Pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Barat dengan

kapasitas 45 ton per jam juga telah selesai dan siap berkontribusi meningkatkan nilai ekonomi Perusahaan dalam jangka panjang.

Lebih jauh lagi, target tanam kami sebesar 1.500 ha pada 2016 di area yang telah terbuka di Papua Barat juga tercapai dengan baik. Kami dapat menyelesaikan perolehan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan izin-izin lainnya sesuai dengan yang ditargetkan.

Terkait aspek pelibatan masyarakat, kami mencatat beberapa pencapaian sesuai target. Di antaranya, kami berhasil menyelenggarakan beberapa konsultasi publik dengan perwakilan masyarakat lokal, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di Papua Barat.

Dari sisi ketenagakerjaan, meski terdapat satu *fatality* di salah satu wilayah perkebunan, secara umum kami melihat jumlah insiden kecelakaan kerja masih terkendali. Dalam aspek pengelolaan lingkungan, target kami untuk mencegah kebakaran hutan di wilayah perkebunan dapat tercapai. Pembangunan area konservasi di wilayah perkebunan kami di Papua Barat juga sudah dimulai.

Pada 2016, kami melanjutkan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Sorong Selatan, Papua Barat. Kami bermitra dengan Yayasan Indonesia Lebih Baik (YILB) untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memotivasi penduduk untuk mengikuti pendidikan informal. Di bidang pendidikan kami bekerja sama dengan Early Childhood Care and Development Resource Center (ECCD-RC) untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Di bidang kesehatan, kami bermitra dengan Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia (YPCII) melakukan survei kesehatan dasar, sedangkan untuk program pemberdayaan ekonomi, kami merintis kerja sama dengan Yayasan Paramitra.

Di bidang lingkungan, pada tahun yang sama, kami melanjutkan kerja sama dengan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) dan The Nature Conservancy (TNC) untuk pengelolaan hutan konservasi dan riset orang utan di Kalimantan Barat. Hingga saat ini perusahaan secara aktif mengelola habitat yang dihuni sekitar 150 orang utan. Program tersebut telah berjalan sejak 2014.

Selain pemenuhan target pada 2016, kami juga mengalami banyak pembelajaran, terutama terkait keberlanjutan sosial dan ekonomi. Berbagai tantangan yang kami hadapi pada 2016 memperkuat keyakinan kami bahwa keseimbangan antara pencapaian imbal hasil bagi investor berupa laba, pelestarian alam dan pelibatan masyarakat setempat sebagai mitra yang sejajar menjadi kunci keberlangsungan usaha kami di masa depan. Selain itu, kami juga semakin memahami pentingnya relasi dan komunikasi internal dan eksternal, termasuk juga dengan masyarakat dan tokoh adat.

Perusahaan Kami di Masa Depan

Hingga akhir 2016, kami telah mencanangkan sejumlah target dan komitmen jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk tahun yang akan datang, kami menargetkan produksi CPO sebesar 213.082 ton. Selain itu, kami juga menetapkan target penanaman 2.371 ha untuk 2017 pada wilayah perkebunan yang sedang kami kembangkan di Papua Barat. Seluruh target penanaman dilakukan di area yang layak tanam dengan mempertimbangkan perencanaan pelestarian keanekaragaman hayati.

Dalam jangka panjang, wilayah perkebunan di Papua Barat akan menjadi sumber produksi kelapa sawit kami yang terbesar di masa depan. Terkait hal tersebut, kami perlu mempersiapkan sumber daya dan masyarakat lokal di wilayah Papua Barat dengan pendekatan yang berkelanjutan.

Untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap Perusahaan, kami melaksanakan program *branding* pada seluruh lini bisnis kami, termasuk kelapa sawit. Upaya ini penting agar karakteristik perusahaan kami dapat dikenal dan diakui oleh pihak eksternal, termasuk dalam hal penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan.

Salah satu kinerja sosial yang terus kami tingkatkan adalah kualitas *Environment, Health and Safety* (EHS) dan sistem keamanan yang dapat memenuhi standar internasional. Kami menetapkan target yang tinggi dalam upaya menurunkan tingkat kecelakaan kerja, di samping melengkapi dan meningkatkan sarana evakuasi di seluruh wilayah perkebunan kami. Bagi karyawan, pelatihan K3 juga akan dilaksanakan lebih intensif lagi.

Dalam hal pelibatan masyarakat, kami terus meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait. Hal ini dilakukan dengan melibatkan berbagai fungsi di organisasi internal kami.

Dalam jangka menengah dan panjang, masa depan kami tidak terlepas dari komitmen terhadap keberlanjutan yang telah kami mulai. Kebijakan *zero waste, zero burning* dan konservasi wilayah akan tetap kami pertahankan dan tingkatkan. Berbagai program pemberdayaan berbasis pendekatan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) akan terus kami kembangkan.

Penutup

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada para investor, dewan komisaris, direksi, manajemen dan karyawan serta para petani yang bermitra dengan kami atas kerja keras dan komitmen menjaga keberlanjutan Perusahaan dan menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan.

Tidak lupa kami sampaikan penghargaan kepada para pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat, tokoh adat, pemerintah, para mitra, media dan publik secara luas atas kerja sama dan dukungan terhadap perusahaan kami.

Kami percaya bahwa dukungan dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan akan menguatkan kami dalam menghadapi tantangan untuk menjalankan komitmen pengembangan yang bertanggung jawab, saat ini dan di masa depan.

Hormat kami,

Istini T. Siddharta
Direktur Utama
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk

LAPORAN KEBERLANJUTAN 2016



Menyokong Sawit (Dokumentasi ANJ)

Untuk pertama kalinya, kami menerbitkan laporan keberlanjutan sebagai bentuk akuntabilitas komitmen kami sebagai Perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Ruang Lingkup, Panduan dan Assurance Independen

Di dalam laporan ini, informasi yang disajikan mencakup kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2016. Kami berencana akan menerbitkan laporan ini setiap tahun di masa yang akan datang. [G4-28] [G4-29] [G4-30]

Berbeda dengan laporan keuangan konsolidasian teraudit, ruang lingkup laporan ini mencakup kinerja keberlanjutan wilayah operasi perkebunan dan produksi kelapa sawit saja. Pada laporan keuangan konsolidasian teraudit, kinerja ekonomi entitas Perusahaan dan seluruh anak perusahaannya, baik yang bergerak pada sektor industri kelapa sawit maupun sektor industri lainnya disajikan secara komprehensif dan terkonsolidasi.

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan data mengenai entitas anak langsung dan tidak langsung yang bernaung di bawah kelompok perusahaan kami.

Tabel Entitas Perusahaan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk dan Anak Perusahaannya yang Tercakup dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit per 31 Desember 2016 [G4-17]

Entitas Anak Langsung*	Entitas Anak Tidak Langsung
<p>Agribisnis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Aceh Timur Indonesia (ATI) 2. PT Surya Makmur (SM) 3. PT Austindo Nusantara Jaya Agri (ANJA)** 4. PT ANJ Agri Papua (ANJAP) 5. PT Austindo Nusantara Jaya Boga (ANJB) 6. PT Gading Mas Indonesia Teguh (GMIT) 	<p>Agribisnis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Sahabat Mewah dan Makmur (SMM)**^ 2. PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (ANJAS)** 3. PT Kayung Argo Lestari (KAL)** 4. PT Galempa Sejahtera Bersama (GSB)**^ 5. PT Putera Manunggal Perkasa (PMP)**^^ PT Permata Putera Mandiri (PPM)**^^ 6. PT Lestari Sagu Papua (LSP)
<p>Energi Terbarukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Austindo Aufwind New Energy (AANE) 2. PT Darajat Geothermal Indonesia (DGI) 	

Catatan:

*) Selain perusahaan-perusahaan tersebut, ANJ juga memiliki investasi minoritas pada Entitas Anak Langsung berikut ini: PT Pangkatan Indonesia, PT Agro Muko, PT Evans Lestari, PT Prima Mitrajaya Mandiri, PT Teguh Jayaprima Abadi.

***) Tercakup dalam Laporan ini

^) Kepemilikan langsung ANJ sebesar 0,04%

^^) Kepemilikan langsung ANJ sebesar 5%

GRI G4 menjadi referensi utama kami untuk menentukan isi dan batasan laporan ini. Selain itu, untuk memperkaya isi laporan, kami juga memperhatikan referensi lainnya dalam membahas beberapa aspek tertentu. Referensi tersebut antara lain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Roundtable on Sustainable Palm Oil-Annual Communication of Progress (RSPO-ACOP), Carbon Disclosure Project (CDP) dan Sustainable Palm Oil Transparency Toolkit (SPOTT). [G4-15]

Kami menyusun laporan ini dengan mengacu pada *core option* Panduan Pelaporan Keberlanjutan (Sustainability Reporting Guidelines) versi G4 yang diterbitkan oleh Global Reporting Initiative (GRI). Laporan ini belum menyertakan *assurance* oleh pihak eksternal yang independen. [G4-32] [G4-33]

Dalam menentukan isi laporan ini, kami mempertimbangkan prinsip pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*), materialitas (*materiality*), konteks keberlanjutan (*sustainability context*) dan kelengkapan (*completeness*) data dan informasi.

**Isi, Kualitas,
Materialitas dan
Batasan Laporan
[G4-18]**

Proses penulisan laporan ini mengedepankan prinsip kejelasan (*clarity*), keterbandingan (*comparability*), keseimbangan (*balance*), akurasi (*accuracy*), keandalan (*reliability*) dan ketepatan waktu (*timeliness*) agar kami dapat menghasilkan laporan yang berkualitas dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

Sesuai dengan GRI G4, informasi dan data yang disajikan dalam laporan ini menekankan pada aspek yang material serta terbatas pada dampak kegiatan usaha Perusahaan terhadap pemangku kepentingan atau terhadap pembangunan berkelanjutan.

Untuk itu, kami melakukan serangkaian proses menentukan materialitas dan batasan laporan sebagai berikut: [G4-18]

1. Kami mengidentifikasi aspek-aspek keberlanjutan yang relevan dengan karakteristik bisnis ANJ dan menentukan batasan aspek material (*boundary*). Proses ini sudah mulai dijalankan di internal kami sejak 2016. Pada 3 Februari 2017, kami melakukan diskusi internal yang dipimpin oleh Direktur Keberlanjutan Usaha untuk menentukan informasi penting terkait aspek keberlanjutan berdasarkan hasil kajian dampak sosial dan lingkungan serta laporan keluhan pemangku kepentingan.
2. Kami membuat prioritas atas aspek-aspek keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan yang akan disajikan pada laporan ini melalui diskusi pada 27 Februari 2017 di Kantor Pusat Perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, aspek prioritas dipilih berdasarkan isu yang relevan dengan perusahaan kelapa sawit.
3. Kami melakukan validasi atas aspek material yang menjadi prioritas. Validasi mendapat persetujuan dari Direksi melalui Direktur Keberlanjutan Usaha selaku pejabat Perusahaan yang bertanggung jawab atas seluruh informasi pada laporan ini.

Setelah laporan pertama ini dipublikasikan, kami akan menerima, memperhatikan dan mengevaluasi kritik dan saran dari pemangku kepentingan untuk perbaikan laporan di periode selanjutnya. Dengan demikian, laporan kami pada tahun yang akan datang diharapkan semakin baik dan berkualitas serta mengakomodir kebutuhan pemangku kepentingan kami.

Diagram berikut menggambarkan proses penyusunan laporan keberlanjutan yang kami lakukan saat ini dan di masa yang akan datang.

Diagram Proses Penyusunan Laporan Keberlanjutan



Proses penentuan materialitas menghasilkan enam aspek yang menjadi bahasan utama dalam laporan ini, yaitu pengelolaan lingkungan, komunitas lokal, lacak balik (*traceability*), sertifikasi keberlanjutan, kinerja ekonomi serta kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Untuk setiap aspek material, kami menentukan batasan pelaporan berdasarkan dampak pada pemangku kepentingan internal dan eksternal, seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel Aspek Material dan Batasan Laporan untuk Laporan Keberlanjutan 2016 [G4-19] [G4-20] [G4-21]

No.	Aspek Material	Dampak Pada Pemangku Kepentingan	
		Internal	Eksternal
A. Kategori Tinggi			
1.	Pengelolaan Lingkungan	Pemegang Saham dan Karyawan	Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
2.	Komunitas Lokal	Pemegang Saham dan Karyawan	Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
3.	Lacak Balik	Pemegang Saham dan Investor	Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pembeli
B. Kategori Sedang			
4.	Sertifikasi Keberlanjutan	Pemegang Saham dan Karyawan	Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pembeli, Masyarakat
5.	Kinerja Ekonomi	Pemegang Saham dan Karyawan	Pemerintah, Masyarakat
6.	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Pemegang Saham dan Karyawan	Pemerintah

Sebagai catatan tambahan bagi para pembaca, laporan ini adalah laporan keberlanjutan pertama kami. Oleh sebab itu, laporan ini tidak memiliki pernyataan kembali (*restatement*) dan kami menyatakan tidak ada perubahan ruang lingkup laporan dan batasan aspek material dalam melaporkan kinerja keberlanjutan kami. [G4-22] [G4-23]



Saran atau pertanyaan dapat disampaikan melalui: [G4-31]

Corporate Communications
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk
Atrium Mulia, Lantai 3A, Suite 3A-02
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B10-11, Jakarta 12910
Tel: +62 21 2965 1777
Fax: +62 21 2965 1788
E-mail: anj.corcomm@anj-group.com
Website: www.anj-group.com

TATA NILAI DAN KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN

[G4-56]



Profit, People, Planet (Dokumentasi ANJ)

Tata nilai kami terdiri dari visi, misi dan nilai-nilai hakiki ANJ yang menjadi landasan kami untuk berkomitmen terhadap tanggung jawab ekonomi, sosial dan lingkungan yang seimbang.

Tata Nilai: Komitmen pada Pengembangan Bertanggung Jawab

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kami memaknai konsep 3P (*profit, people, planet*) di wilayah operasional kami sebagai Pengembangan Bertanggung Jawab, yaitu:

1. *Profit*: mendapatkan keuntungan yang wajar dari hasil usaha yang kokoh.
2. *People*: maju bersama dengan masyarakat sebagai mitra yang sejajar.
3. *Planet*: menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pada setiap operasi ANJ.

Dalam rangka menanamkan dan memperkuat tata nilai di dalam organisasi, kami melatih karyawan yang kemudian dinobatkan menjadi *value champions*. Seluruh karyawan pun wajib mengikuti *values workshop*. Hingga akhir 2016 sebanyak 27 orang karyawan telah mengikuti pelatihan dan menjadi *value champions* di wilayah kerja masing-masing di perkebunan dan kantor kami. Mereka yang telah menjadi *value champions* berperan untuk mengomunikasikan, mempraktikkan dan menularkan nilai-nilai ANJ di lingkup kerja masing-masing.

Selain memiliki peran tersebut, *value champions* juga memberikan laporan dan masukan kepada Komite ANJ Value secara rutin. Komite melakukan analisis bulanan atas laporan dan masukan dari *value champions*. Hasil analisis tersebut dilaporkan kepada *value guardians*, yaitu George Santosa Tahija dan Anastasius Wahyuhadi, yang keduanya merupakan Komisaris di perusahaan kami.

VISI	MISI	NILAI-NILAI HAKIKI ANJ
Menjadi perusahaan pangan dan energi terbarukan kelas dunia yang meningkatkan citra bangsa Indonesia	Berkomitmen menghasilkan produk berkualitas ramah lingkungan dengan berpegang teguh pada tata kelola yang baik untuk mencapai kinerja unggul, mewujudkan kesejahteraan karyawan serta menjadikan masyarakat mitra setara.	<ul style="list-style-type: none">• Integritas• Menghargai Sesama Manusia dan Lingkungan• Peningkatan Kemampuan Secara Berkesinambungan

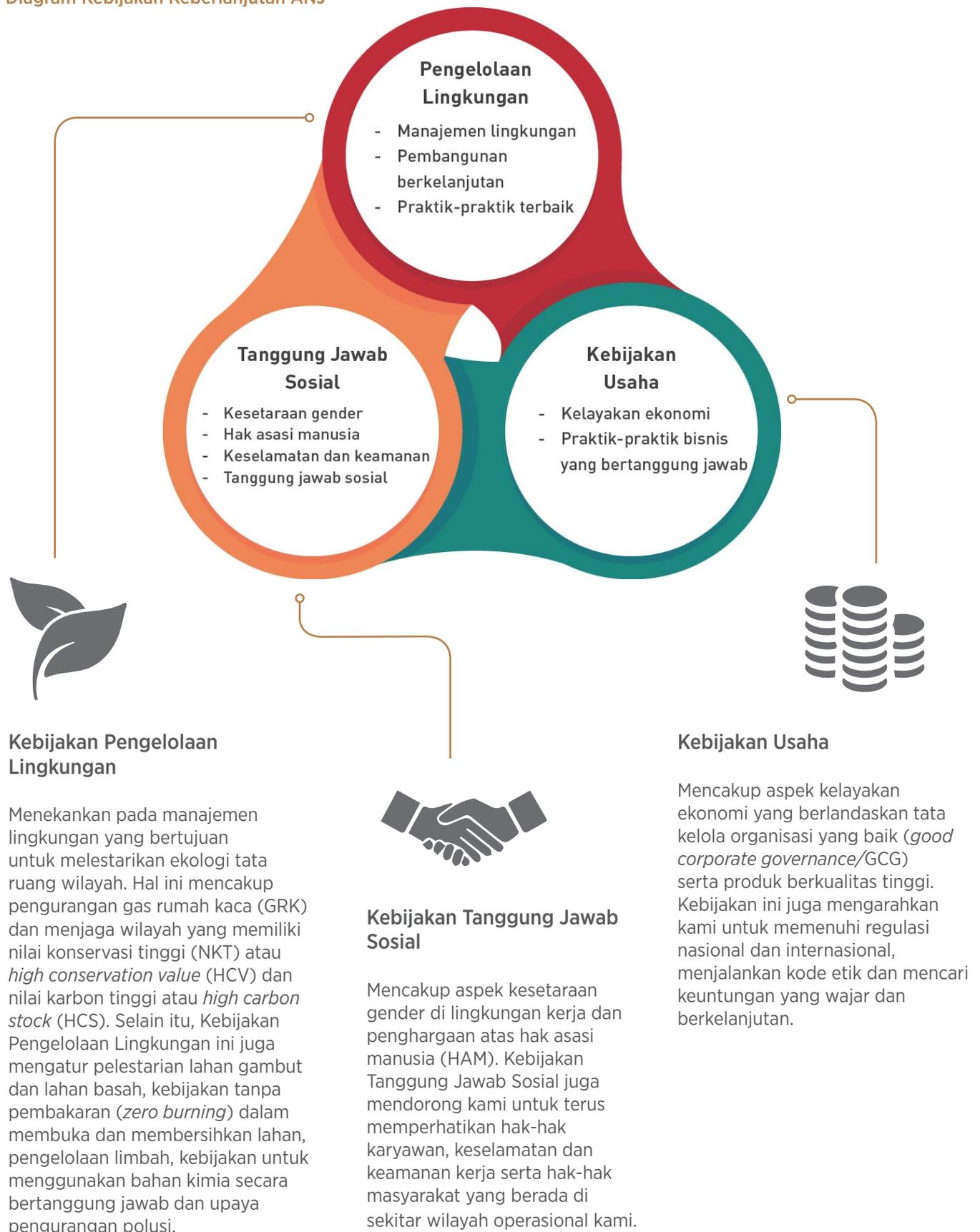
Tiga Pilar Kebijakan Keberlanjutan

Kebijakan Keberlanjutan ANJ merupakan interpretasi tata nilai kami yang menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam tiga komponen utama, yaitu pengelolaan lingkungan, kebijakan usaha dan tanggung jawab sosial.

Pada 28 November 2016, Direksi telah menandatangani secara langsung Kebijakan Keberlanjutan ANJ sebagai bentuk komitmen manajemen terhadap pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab ekonomi, sosial dan lingkungan.

Berikut ini adalah diagram yang menggambarkan tiga komponen utama Kebijakan Keberlanjutan ANJ.

Diagram Kebijakan Keberlanjutan ANJ



TENTANG PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

Kegiatan usaha PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) meliputi perkebunan kelapa sawit, pemanenan dan pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi minyak kelapa sawit atau *crude palm oil* (CPO) dan inti sawit atau *palm kernel* (PK) serta penjualan CPO dan PK ke dalam dan luar negeri. Pembeli produk kami adalah agen, perusahaan distribusi dan pabrik pengolah CPO menjadi produk turunan lain. [G4-8]

	<p>Nama Perusahaan [G4-3]</p>	<p>PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.</p>
	<p>Tanggal Pendirian</p>	<p>16 April 1993</p>
	<p>Bentuk Legal dan Kepemilikan Saham [G4-7]</p>	<p>Perseroan Terbatas Terbuka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2013 • Kode Saham: ANJT • Pemegang Saham <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Austindo Kencana Jaya 40,85% 2. PT Memimpin Dengan Nurani 40,85% 3. Sjakon George Tahija 4,74% 4. George Santosa Tahija 4,74% 5. Publik 7,55%
	<p>Produk [G4-4]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Minyak kelapa sawit (<i>Crude Palm Oil/CPO</i>) • Inti sawit (<i>Palm Kernel/PK</i>)
	<p>Kantor Pusat [G4-5]</p>	<p>Atrium Mulia Lantai 3A, Suite 3A-02, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B10-11 Jakarta 12910 Tel: +62 21 2965 1777 Fax: +62 21 2965 1788 Website: www.anj-group.com</p>

 <p>Wilayah Operasi [G4-6]</p>	<p>Negara Indonesia, di Provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumatera Utara • Bangka Belitung • Sumatera Selatan • Kalimantan Barat • Papua Barat
 <p>Pemasaran [G4-8]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam dan luar negeri • Agen, perusahaan distribusi dan perusahaan yang mengolah minyak kelapa sawit menjadi produk turunannya
 <p>Luas Lahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan produksi: 47.711,42 ha • Lahan pengembangan: 104.009,47 ha • Lahan konservasi: 41.800,05 ha • Lahan petani mitra: 18.143,22 ha
 <p>Sumber Daya Manusia* [G4-9]</p>	<p>Total: 7.396 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki: 5.981 orang • Perempuan: 1.415 orang
 <p>Sertifikasi** [G4-15]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) • Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) • ISO 14001:2015 Environmental Management System • International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) • Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) • Occupational Health and Safety (OHSAS)

*) Termasuk seluruh entitas usaha

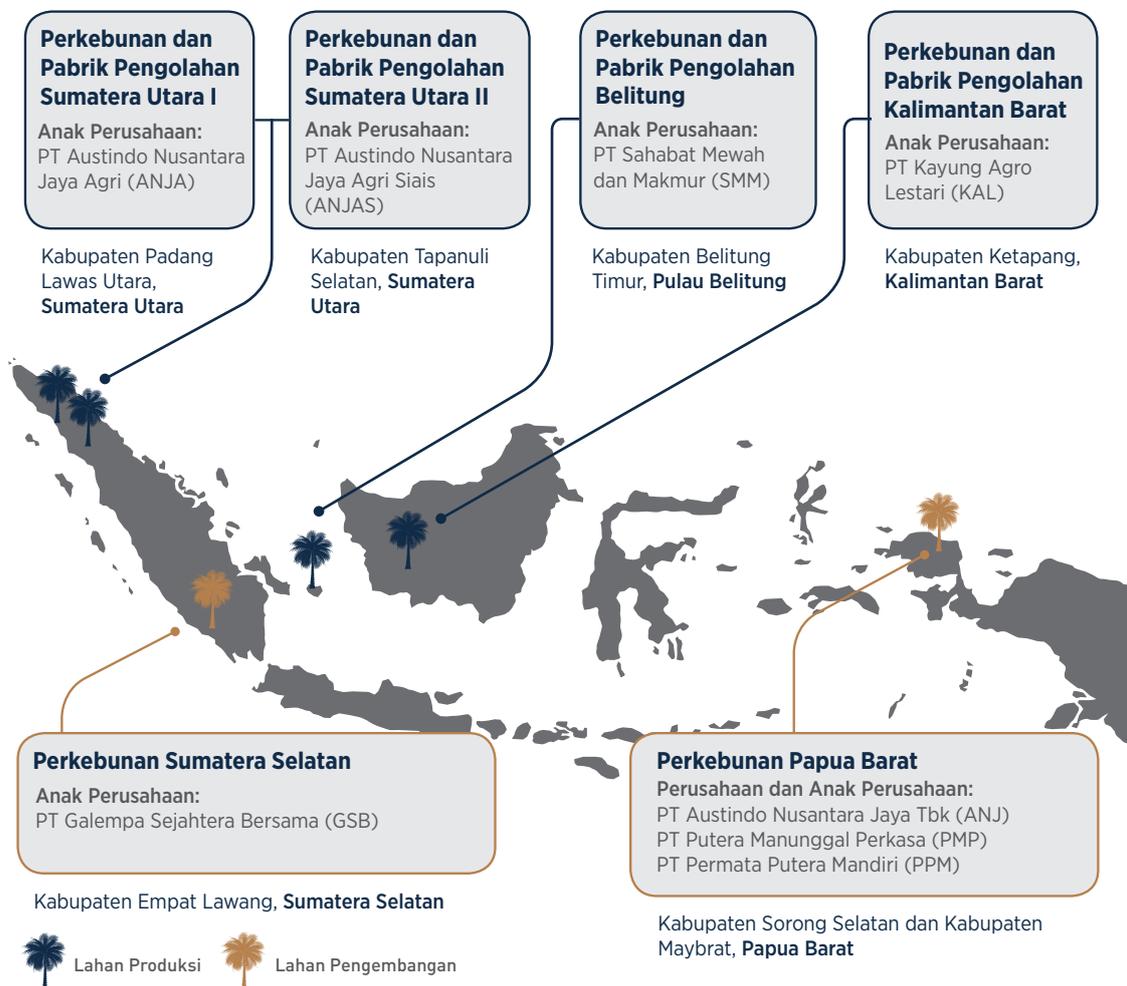
**) Pada wilayah perkebunan tertentu

Tabel Skala Organisasi per 31 Desember 2015 dan 2016 [G4-9]

Uraian	Satuan	2016	2015
Jumlah Karyawan/Pekerja	Orang	7.396	7.279
Jumlah Area Operasi	Area	4	4
Jumlah Area Pengembangan	Area	4	4
Pendapatan	USD	134.443.317	125.994.045

Total Kapitalisasi	Total Kewajiban	USD	130.014.125	68.568.665
	Total Ekuitas	USD	340.429.895	375.460.796
Total Aset		USD	525.107.676	470.444.020
Jumlah Laba Bersih		USD	9.199.245	-8.386.414
Produk	Kelapa Sawit dan Inti Sawit			
Produksi TBS		Ton	663.399	756.674
TBS Pihak Ketiga		Ton	177.882	136.190
TBS Yang Diolah		Ton	841.281	892.864
Produksi CPO		Ton	177.273	192.891
Produksi PK		Ton	38.284	44.204
Penjualan CPO		Ton	177.850	194.248
Penjualan PK		Ton	39.434	43.019

Peta Lokasi Wilayah Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit [G4-6][G4-13]



**Kebijakan
Pengelolaan Lahan:
Legalitas, Zero
Burning dan Zero
Waste**

Saat ini kami mengelola 47.711,42 ha lahan perkebunan yang sudah menghasilkan CPO dan PK di Sumatera Utara, Belitung dan Kalimantan Barat. Untuk menjaga keberlanjutan bisnis kami di masa depan, kami juga mengelola 104.009,47 ha lahan perkebunan dalam tahap pengembangan di wilayah Sumatera Selatan dan Papua Barat.

Kami memiliki kebijakan untuk mematuhi izin penggunaan lahan sesuai dengan peraturan dan persyaratan sertifikasi, termasuk Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, izin lokasi, izin lingkungan dan izin usaha perkebunan. Seluruh lahan perkebunan kami berstatus HGU, kecuali wilayah perkebunan di Sumatera Selatan seluas 12.800 ha.

Berikut adalah tabel yang menyajikan data luas lahan perkebunan kelapa sawit dalam tahap produksi dan pengembangan berdasarkan lokasi dan statusnya.

Tabel Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Lokasi dan Status Legalitas per 31 Desember 2016

Wilayah Perkebunan Produksi				Total %
Lokasi	HGU Inti (ha)	HGU Plasma (ha)	Luas (ha)	
Sumatera Utara I	9.321,95	-	9.321,95	19,54%
Sumatera Utara II	9.171,82	-	9.171,82	19,22%
Belitung*	16.276,84	-	16.276,84	34,12%
Kalimantan Barat*	10.920,36	2.020,45	12.940,81	27,12%
Total	45.690,97	2.020,45	47.711,42	100,00%

Wilayah Perkebunan Pengembangan				Total %
Lokasi	HGU Inti (ha)	HGU Plasma (ha)	Luas (ha)	
Sumatera Selatan*	-	-	12.800,00	12,31%
Papua Barat	75.946,70	15.262,77	91.209,47	87,69%
Total	75.946,70	15.262,77	104.009,47	100,00%

Total Kebun	HGU Inti (ha)	HGU Plasma (ha)	Luas (ha)	Total %
Beroperasi / Produksi	45.690,97	2.020,45	47.711,42	31,45%
Pengembangan	75.946,70	15.262,77	104.009,47	68,55%
Total	121.637,67	17.283,22	151.720,89	100,00%

*status lahan adalah izin lokasi

Sesuai dengan Kebijakan Keberlanjutan, kami telah mengelola lahan produksi dengan menerapkan kebijakan tanpa pembakaran (*zero burning*) dan meminimalkan limbah (*zero waste*). Kedua kebijakan ini dalam praktiknya telah kami terapkan sejak kami memulai investasi di bidang perkebunan kelapa sawit pada 2001. Dengan *zero burning*, kami mencegah kerusakan hutan, meminimalkan emisi dan mencegah dampak negatif bagi kesehatan masyarakat meski hal ini berarti proses pembersihan lahan memakan waktu dan biaya lebih besar. Hal ini sesuai dengan UU No. 39/2014 tentang Perkebunan.

Dalam menerapkan *zero waste*, kami memanfaatkan tandan sawit kosong sebagai sumber energi *biomass* pada lokasi pabrik pengolahan kelapa sawit kami. Dengan demikian, kami memiliki kemandirian energi dalam beroperasi dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Limbah cair dari pengolahan kelapa sawit atau *palm oil mill effluent* (POME) juga kami gunakan untuk pupuk (*land application*) dan diolah menjadi sumber energi listrik.

Saat ini kami mengelola wilayah operasional kami di Papua Barat, bersama dengan dua anak perusahaan, dengan total luas lahan berstatus HGU sebesar 75.946,70 ha.

Pengelolaan Lahan Papua Barat: Investasi yang Berkelanjutan

Perkebunan kelapa sawit di Papua Barat saat ini berada pada tahap pengembangan dan diproyeksikan menjadi investasi kami yang berkelanjutan di masa depan.

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan data luas lahan perkebunan kelapa sawit kami di Papua Barat berdasarkan legalitas dan anak perusahaan pengelola lahan.

Tabel Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Status dan Anak Perusahaan Pengelola di Papua Barat per 31 Desember 2016

Lokasi	Wilayah Perkebunan Pengembangan			Total %
	HGU Inti (ha)	HGU Plasma (ha)	Luas (ha)	
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	30.515,75	5.990,18	36.505,93	35,10%
PT Permata Putera Mandiri	26.570,66	5.454,48	32.025,14	30,79%
PT Putera Manunggal Perkasa	18.860,29	3.818,11	22.678,40	21,80%
Total	75.946,70	15.262,77	91.209,47	100,00%

Kami memiliki komitmen untuk melakukan pengembangan lahan secara berkelanjutan di wilayah Papua Barat meski kami memahami tantangan berat yang dihadapi. Tuntutan kompensasi lahan, minimnya peta tata batas lahan antar marga dan keinginan masyarakat untuk segera maju dengan program pengembangan merupakan isu-isu sosial di wilayah tersebut yang perlu kami kelola. Mengingat kekayaan alam yang signifikan di wilayah tempat kami beroperasi, Perusahaan melakukan perencanaan pengembangan kebun dengan seksama yang meminimalkan penurunan kekayaan tersebut, misalnya dengan melakukan pemetaan area NKT secara terperinci.

Terkait hal tersebut, kami berinisiatif melakukan konsultasi publik secara berkala dengan para pemangku kepentingan setempat. Kami juga senantiasa memenuhi seluruh aspek regulasi pemerintah Indonesia dan RSPO serta berkomitmen dan mulai melakukan perencanaan terintegrasi untuk pengelolaan lahan konservasi dan memajukan masyarakat setempat.

Kebijakan *zero burning* dan *zero waste* juga menjadi landasan kami untuk mengelola perkebunan di Papua Barat saat ini dan di masa depan. Inisiatif membangun wilayah konservasi di wilayah tersebut juga telah berjalan. Dengan komitmen kami untuk bertanggung jawab sosial dan mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, kami yakin bahwa upaya kami di wilayah Papua Barat akan memberi manfaat bagi masyarakat dan Perusahaan dalam jangka panjang.

Tata Kelola Keberlanjutan [G4-34]

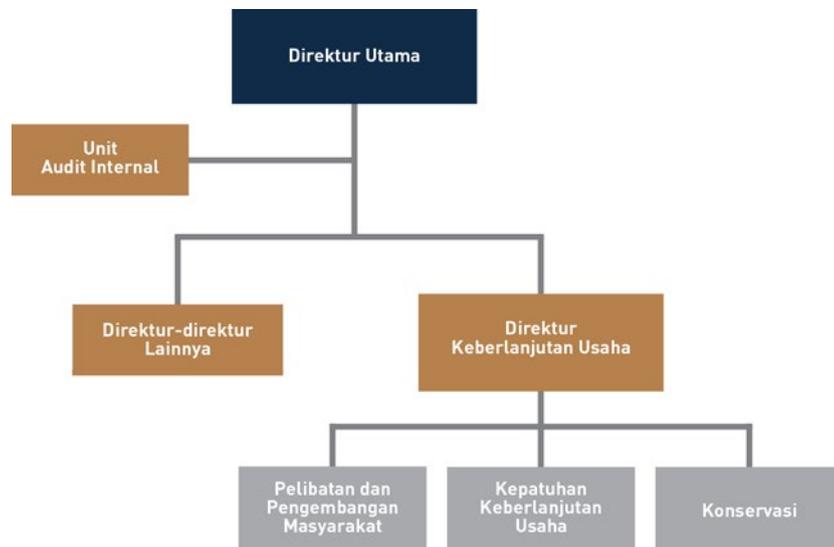
Dalam mengelola wilayah perkebunan kami di Pulau Sumatera, Belitung, Kalimantan dan Papua, kami menjalankan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan mengacu kepada ketentuan undang-undang. Hal ini tercermin pada posisi Direktur Keberlanjutan yang kami miliki dan struktur organisasi yang sejalan dengan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Seperti perseroan terbatas lainnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi yang dipimpin Direktur Utama merupakan tata kelola tertinggi di dalam Perusahaan. Direktur Keberlanjutan Usaha yang berada di bawah supervisi Direktur Utama, bertanggung jawab penuh atas fungsi kepatuhan (*compliance*), konservasi (*conservation*) serta pelibatan dan pengembangan masyarakat (*community involvement and development* atau CID) yang masing-masing menjadi satu departemen tersendiri.

Lebih jauh lagi, Direktur Keberlanjutan Usaha juga melakukan analisis dan mengambil kebijakan dengan persetujuan Direktur Utama atas hasil pemetaan sosial dan evaluasi dampak sosial dan lingkungan, termasuk yang terkait dengan pengembangan lahan perkebunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada setiap wilayah perkebunan, terdapat *Manager CID & Government Relations* yang membantu Direktur Keberlanjutan Usaha dalam hal pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat.

Berikut ini terlampir diagram struktur tata kelola Perusahaan yang khusus terkait dengan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan usaha.

Diagram Struktur Tata Kelola Perusahaan yang Bertanggung Jawab atas Aspek Keberlanjutan



Departemen Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (Departemen CID) merupakan transformasi dari Departemen Tanggung Jawab Sosial (Departemen CSR) sejak April 2016. Dalam pelaksanaannya, Departemen CID memiliki *General Manager*, masing-masing untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan Barat, serta wilayah Papua Barat, yang mengelola dan memastikan program-program CID sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan di wilayah perkebunan kami.

Berbasiskan pada tujuh topik utama (*core subject*) ISO 26000, Departemen CID membagi kegiatannya menjadi dua kategori, yaitu transformasi kehidupan berkelanjutan dan filantropi. Kedua kategori tersebut diturunkan menjadi lima bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan agama serta infrastruktur.

Sertifikasi: Menyeluruh dan Bertahap [G4-15]

Sertifikasi aspek sosial dan lingkungan oleh pihak ketiga yang independen merupakan upaya kami untuk memastikan praktik bisnis kami berjalan baik dan perusahaan kami kredibel di mata para pemangku kepentingan. Selain itu, mengikuti sertifikasi juga menjadi salah satu pendekatan kami dalam menerapkan tanggung jawab sosial dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Per akhir 2016, kami telah mengikuti berbagai sertifikasi berikut:

- Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
- Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
- ISO 14001:2015 Environmental Management (ISO 14001)
- International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)
- Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
- OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS 18001)
- Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Proses sertifikasi pada lahan-lahan produksi dilakukan secara bertahap. Di antara empat lahan produksi yang kami kelola, wilayah perkebunan Sumatera Utara I telah berhasil mengikuti dan menerapkan seluruh sertifikasi. Wilayah perkebunan Kalimantan Barat masih mengikuti proses audit sertifikasi RSPO dan ISPO pada September 2016, sesuai dengan fase pengembangannya yang baru memasuki tahap komersial. Khusus untuk lahan yang masih pada tahap pengembangan, sertifikasi belum dilakukan dan baru direncanakan untuk masa yang akan datang.

Tabel berikut menyajikan data jenis sertifikasi, wilayah, masa berlaku dan pihak pelaksana sertifikasi per akhir 2016.

Tabel Jenis Sertifikasi berdasarkan Wilayah, Jenis Sertifikasi, Masa Berlaku dan Pihak Pelaksana Sertifikasi per 31 Desember 2016

Sertifikasi	Wilayah Lahan Produksi			
	Sumatera Utara I	Sumatera Utara II	Belitung	Kalimantan Barat
RSPO	November 2012-2017 TUV Rheinland	September 2014-2019 Mutu Agung Lestari	Januari 2016-2021 Mutu Agung Lestari	Proses audit September 2016 Mutu Agung Lestari
ISPO	Juli 2016-2021 TUV NORD Indonesia	April 2014-2019 Mutu Agung Lestari	Desember 2014-2019 TUV NORD Indonesia	Proses audit September 2016 Mutu Agung Lestari
ISO 14001	Juli 2014-2017 TUV NORD Indonesia	November 2014-2017 TUV NORD Indonesia	April 2015-2018 TUV NORD Indonesia	Dalam proses
ISCC	November 2016-2017 TUV NORD Indonesia	Tidak berlaku	Januari 2016-2017 TUV NORD Indonesia	Tidak berlaku
PROPER	Biru, 2015-2016	Belum terpilih	Biru, 2015-2016	Belum terpilih
PROPER Gambut	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Biru, 2016
OHSAS 18001	September 2016-2019 Sucofindo	Belum dijadwalkan	Belum dijadwalkan	Belum dijadwalkan
SMK3	Mei 2016-2019 Sucofindo	Mei 2014-2017 Sucofindo	Agustus 2015-2018 Sucofindo	Rencana pada 2017

Keanggotaan Asosiasi

Selain mengikuti sertifikasi, kami juga menjadi anggota asosiasi dengan tujuan untuk menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan serta bertukar informasi terkini terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Setiap tahun kami membayar iuran keanggotaan, namun tidak ada kegiatan lain yang memerlukan biaya tambahan secara signifikan.

Tabel berikut menyajikan informasi status keanggotaan kami per 31 Desember 2016 pada asosiasi usaha.

Tabel Keanggotaan pada Asosiasi per 31 Desember 2016 [G4-16]

Asosiasi	Peran
Asosiasi Emiten Indonesia	Terlibat sebagai anggota asosiasi.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Sumatera Utara	Terlibat dalam forum pertemuan untuk mengkoordinasikan pemenuhan terkait kebijakan-kebijakan pemerintah, sertifikasi RSPO dan ISPO, GAPKI.
Asosiasi Perkebunan Besar Swasta (APBS) Belitung	Pertemuan untuk mengkoordinasikan pemenuhan kebijakan pemerintah.

Pendekatan Pencegahan (*Precautionary Approach*) [G4-14]

Kami memiliki pendekatan pencegahan atau *precautionary approach* terhadap risiko ekonomi, sosial dan lingkungan yang diterapkan melalui dua cara. Pertama yaitu manajemen risiko (*risk management*) yang bertujuan untuk memetakan dan mengendalikan risiko. Yang kedua, yaitu pengendalian kualitas (*quality control*) terhadap hasil produksi kelapa sawit untuk menjaga keberlanjutan ekonomi Perusahaan.

Perusahaan kami telah mengidentifikasi dan merumuskan pengendalian atas risiko ekonomi, sosial dan lingkungan, seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel Ikhtisar Risiko dan Pengendaliannya

Risiko	Pengendalian
Fluktuasi harga CPO	Menerapkan skema kontrak penjualan dengan pembatasan tertentu
Pengembangan lahan tertunda karena isu kompensasi lahan	Membentuk komite pembebasan lahan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat
Penundaan atau kendala mendapatkan Hak Guna Usaha	Mengurus HGU lebih awal sesuai regulasi
Isu sosial dan perselisihan hak atas tanah	Komunikasi rutin dengan masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi independen lain dalam menyelesaikan perselisihan terkait lahan
Kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas	Memiliki standar remunerasi dan program kesejahteraan karyawan yang memadai
Insiden dalam pengangkutan atau logistik	Membangun sistem transportasi yang baik
Perubahan iklim: cuaca buruk, penyakit, hama dan bencana alam	Menerapkan praktik-praktik perkebunan terbaik yang mengadaptasi perubahan iklim
Isu lingkungan dan kemasyarakatan serta kepatuhan terhadap regulasi	Memenuhi regulasi dan standar lingkungan, melakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, seperti pemerhati lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat

Catatan:

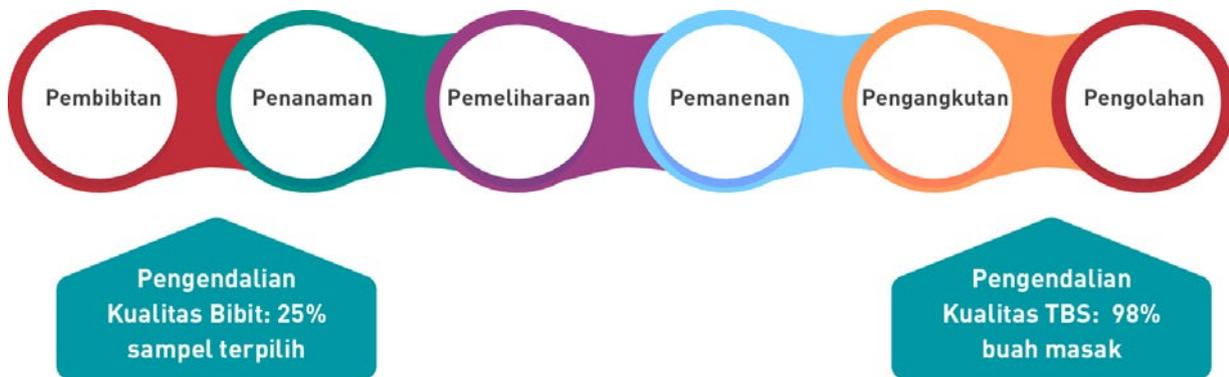
Informasi lebih rinci mengenai manajemen risiko dapat dilihat pada Laporan Tahunan 2016 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Pelaksanaan pengendalian atas risiko-risiko tersebut dijalankan oleh berbagai divisi atau fungsi yang terkait di bawah tanggung jawab Direksi. Pengawasan atas manajemen risiko dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko, yang merupakan bagian dari Dewan Komisaris. Komite ini wajib memberikan laporan langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Manajemen Risiko juga bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan saran mengenai manajemen risiko kepada Direksi.

Selanjutnya, kami mengikuti pendekatan pencegahan dalam konteks pengendalian kualitas. Kami memiliki dua titik pengendalian utama untuk memastikan hasil produksi kelapa sawit yang berkualitas. Pertama, pada proses seleksi pembibitan kelapa sawit. Kedua, proses seleksi kualitas TBS yang diterima di pabrik pengolahan kelapa sawit. Seleksi pada kedua titik tersebut dengan standar 25% sampel yang terpilih pada proses pembibitan dan 98% buah masak pada proses penerimaan TBS.

Diagram berikut menjelaskan pengendalian kualitas produksi kelapa sawit yang diterapkan di perusahaan kami.

Diagram Pengendalian Kualitas pada Pembibitan dan Sebelum Pengolahan Kelapa Sawit



Untuk memastikan kegiatan pengendalian risiko dan kualitas berjalan baik dan konsisten, kami juga telah menyusun pedoman dan *standard operating procedure* (SOP) atau standar prosedur operasi yang terkait proses pembenihan, penanaman dan pemanenan kelapa sawit.

Pada tahap pembenihan, penanaman dan pemeliharaan, kami memiliki SOP Pembibitan Kelapa Sawit dan Sertifikat Benih serta SOP Penanaman Kelapa Sawit. Berikutnya, pada tahap pemanenan dan penerimaan TBS, kami menjalankan SOP Panen Tandan Buah Segar (TBS), SOP Penerimaan TBS dan SOP Grading TBS.

Selain itu, kami memiliki dan menjalankan SOP Pengelolaan Lahan Gambut, SOP Konservasi Tanah dan Air serta SOP Pengelolaan Lahan Marginal. Keberadaan dokumen tersebut menjadi acuan kami untuk mengelola dampak lingkungan dari kegiatan perkebunan kelapa sawit kami.

**Sumber Daya Manusia:
Berbasis Kinerja dan Potensi Lokal**
[G4-10]

Per 31 Desember 2016, 5.981 tenaga kerja atau 80,87% sumber daya manusia kami adalah laki-laki dan selebihnya perempuan. Perusahaan kami tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal pengembangan sumber daya manusia namun pada kenyataannya minat tenaga kerja laki-laki lebih tinggi dari minat tenaga kerja perempuan untuk bekerja di sektor industri kelapa sawit.

Dari total tenaga kerja sebesar 7.396 orang per 31 Desember 2016, sebanyak 92,43% berstatus karyawan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT atau karyawan tetap) dan hanya 7,57% berstatus karyawan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Jika dibandingkan pada 2015, total jumlah karyawan tidak mengalami perubahan yang signifikan, namun kami melakukan penambahan karyawan PKWT dari 317 orang pada 2015 menjadi 560 orang pada 2016. Jumlah dan komposisi karyawan tersebut mencerminkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kinerja operasional dan kebutuhan lahan produksi dan pengembangan.

Pada 2016, kami juga menerima delapan orang peserta program magang, yang terdiri dari enam laki-laki dan dua perempuan. Selain itu, terdapat tenaga ahli

yang dikontrak secara perorangan sejumlah empat orang, yang seluruhnya laki-laki.

Berikut ini adalah perbandingan komposisi karyawan berdasarkan status ketenagakerjaan dan gender pada 2015 dan 2016 yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Status dan Gender per 31 Desember 2015 dan 2016

Komposisi Karyawan	2016				2015			
	Pria	%	Wanita	%	Pria	%	Wanita	%
Karyawan Tetap	5.533	74,81%	1.303	17,62%	5.600	76,93%	1.362	18,71%
Karyawan Kontrak	448	6,06%	112	1,51%	265	3,64%	52	0,71%
Jumlah	5.981	80,87%	1.415	19,13%	5.865	80,57%	1.414	19,43%
	7.396				7.279			

Jika ditinjau berdasarkan level jabatan, 91,71% sumber daya manusia kami pada 2016 merupakan buruh dan karyawan. Selebihnya merupakan staf, manajer, *general manager* dan direksi dengan total persentase 8,29%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perubahan signifikan terjadi pada penurunan jumlah staf dari 466 menjadi 358 orang dan peningkatan jumlah manajer dari 92 menjadi 204 orang. Hal ini terjadi karena sejumlah staf meningkat karirnya menjadi asisten manajer dan manajer karena dinilai telah memiliki pengalaman dan kapasitas yang baik dibanding sebelumnya berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan di perusahaan kami.

Tabel berikut menjelaskan komposisi karyawan berdasarkan level jabatan dan gender pada 2015 dan 2016.

Tabel Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan dan Gender per 31 Desember 2015 dan 2016

Jabatan	%	2016			%	2015		
		Jumlah	Pria	Wanita		Jumlah	Pria	Wanita
Direktur	0,15%	11	9	2	0,16%	12	10	2
General Manager (GM)	0,54%	40	35	5	0,51%	37	33	4
Manajer	2,76%	204	180	24	1,26%	92	84	8
Staf	4,84%	358	305	53	6,40%	466	400	66
Buruh dan karyawan	91,71%	6.783	5.452	1.331	91,66%	6.672	5.338	1.334
Jumlah	100,00%	7.396	5.981	1.415	100,00%	7.279	5.865	1.414

Sesuai dengan karakteristik Perusahaan, sumber daya manusia kami tersebar di seluruh wilayah operasional dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Jumlah pekerja di lahan produksi tentu lebih banyak dari jumlah pekerja di lahan pengembangan.

Jumlah pekerja di wilayah Sumatera Utara, yang mencakup perkebunan Sumatera Utara I dan II, tercatat sekitar 30% dari total tenaga kerja kami. Persentase sumber daya manusia di wilayah perkebunan Belitung dan Kalimantan Barat masing-masing 19,71% dan 19,74% dari total sumber daya manusia.



Program *management trainee* (Dokumentasi ANJ)

Setiap tahun Perusahaan melakukan seleksi karyawan yang akan menjalani pelatihan terpadu sebagai persiapan untuk menjadi pemimpin di perusahaan kami. Pada 2016 kami mengevaluasi dan menyempurnakan program *management trainee* (MT) dengan melakukan perubahan terhadap kurikulum, metode, persiapan fasilitator serta sistem pendampingan dan program mentor.

Program inti MT berlangsung selama sembilan bulan dan setiap gelombang diikuti oleh 20 hingga 30 peserta pelatihan. Di 2016, program ini diikuti oleh 20 peserta. Peserta yang lulus akan melanjutkan program pengembangan, yaitu program mentor dan pelatihan kepemimpinan. Jika peserta menunjukkan prestasi dan potensi yang baik, dalam waktu lima tahun sejak kelulusan peserta diharapkan dapat mencapai posisi manajerial.

Selain menyesuaikan jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan operasional, kami juga memperhatikan potensi tenaga lokal di masing-masing wilayah perkebunan. Kebijakan ini berlaku juga untuk area yang masih dalam tahap pengembangan di Sumatera Selatan dan Papua Barat.

Hingga akhir 2016, kami telah mengadakan beberapa program untuk meningkatkan sumber daya manusia lokal Papua Barat di sekitar perkebunan. Bersama pemerintah setempat, kami turut memperbaiki pendidikan dasar, pendidikan lanjutan dan pendidikan vokasi kepada masyarakat yang berasal dari suku Awee, Iwaro, Maybrat dan Kaiso. Perekrutan MT asli Papua yang dilatih di perkebunan Sumatera dan Kalimantan Barat juga telah kami mulai.

Data komposisi karyawan berdasarkan lokasi kerja pada 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi Kerja per 31 Desember 2015 dan 2016

Lokasi	2016				2015			
	Pria	%	Wanita	%	Pria	%	Wanita	%
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (Jakarta)	67	0,91%	30	0,41%	55	0,76%	21	0,29%
PT Austindo Nusantara Jaya Agri (Sumatera Utara I)	1.283	17,35%	191	2,58%	1.274	17,50%	151	2,07%
PT Austindo Nusantara Jaya Agri (Medan)	46	0,62%	28	0,38%	52	0,71%	28	0,38%
PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (Sumatera Utara II)	958	12,95%	266	3,60%	1.036	14,23%	281	3,86%
PT Galempa Sejahtera Bersama (Sumatera Selatan)	111	1,50%	8	0,11%	108	1,48%	10	0,14%
PT Sahabat Mewah dan Makmur (Belitung)	1.458	19,71%	302	4,08%	1.546	21,24%	320	4,40%
PT Kayung Agro Lestari (Kalimantan Barat)	1.460	19,74%	500	6,76%	1.258	17,28%	509	6,99%
PT ANJ Agri Papua (Papua Barat)	183	2,47%	24	0,32%	146	2,01%	24	0,33%
PT Austindo Aufwind New Energy (Belitung)	4	0,05%	0	0,00%	6	0,08%	0	0,00%

Lokasi	2016				2015			
	Pria	%	Wanita	%	Pria	%	Wanita	%
PT Gading Mas Indonesia Teguh (Jember)	54	0,73%	2	0,03%	50	0,69%	2	0,03%
PT Permata Putera Mandiri (Papua Barat)	155	2,10%	20	0,27%	149	2,05%	21	0,29%
PT Putera Manunggal Perkasa (Papua Barat)	202	2,73%	44	0,59%	185	2,54%	47	0,65%
Jumlah	5.981	80,87%	1.415	19,13%	5.865	80,57%	1.414	19,43%
			7.396				7.279	

Kami membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk tumbuh bersama perusahaan kami sebagai pemasok, mitra maupun karyawan. Secara umum, klasifikasi tenaga kerja yang diserap adalah karyawan harian lepas (KHL), karyawan harian tetap (KHT), karyawan bulanan tetap (KBT) dan staf. Kami memberikan imbal jasa pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan pemberian upah minimum di setiap wilayah perkebunan berada.

Hingga akhir 2016, kami mencatat sebanyak 3.293 karyawan lokal atau 51,31% dari total karyawan di wilayah perkebunan produksi di Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, Belitung dan Kalimantan Barat. Di Sumatera Selatan dan Papua Barat, karyawan lokal kami mencapai 578 orang atau 77,38% dari total karyawan yang bekerja di wilayah perkebunan pengembangan. Tergantung kesediaan tenaga kerja lokal yang memenuhi kriteria kompetensi, sedapat mungkin kami mempertahankan dan meningkatkan jumlah tenaga kerja lokal di masa depan. Hal ini sejalan dengan visi kami untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan memberi kontribusi ekonomi bagi masyarakat lokal.

Berikut adalah tabel yang menyajikan data jumlah tenaga kerja lokal berdasarkan wilayah perkebunan per akhir Desember 2016.

Tabel Jumlah Karyawan Lokal Berdasarkan Wilayah Perkebunan per 31 Desember 2016

Lokasi Perkebunan Produksi	Total Karyawan	Karyawan Lokal	%
Sumatera Utara I	1.417	365	24,76%
Sumatera Utara II	1.224	664	54,25%
Belitung	1.760	1.277	72,56%
Kalimantan Barat	1.960	987	50,36%
Jumlah	6.418	3.293	51,31%

Lokasi Perkebunan Pengembangan	Total Karyawan	Karyawan Lokal	%
Sumatera Selatan	119	107	89,92%
Papua Barat	628	471	75,00%
Jumlah	747	578	77,38%

Perkebunan	Total Karyawan	Karyawan Lokal	%
Produksi	6.418	3.293	51,31%
Pengembangan	747	578	77,38%
Jumlah	7.165	3.871	54,03%



PEDULI LINGKUNGAN LESTARI

1



MENJAGA KELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Keanekaragaman hayati merupakan isu yang sangat penting bagi perusahaan kami dalam mengelola perkebunan kelapa sawit karena beberapa hal. Pertama, kami memiliki tata nilai dan kebijakan keberlanjutan yang mendorong kami untuk menjaga kelestarian hutan dan ekosistem di dalamnya.

Kedua, kami juga berkomitmen untuk turut mendukung Tujuan 15 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengenai perlindungan dan konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Yang ketiga, Pemerintah Indonesia sebagai salah satu pemangku kepentingan utama memiliki berbagai regulasi terkait pelestarian keanekaragaman hayati, antara lain:

1. Undang-Undang No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
2. Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan.
3. Undang-Undang No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
4. Peraturan Pemerintah No. 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Terkait dengan hal tersebut, kami melakukan berbagai upaya dan pendekatan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Pendekatan utama yang kami lakukan yaitu mengidentifikasi dan melakukan konservasi keanekaragaman hayati di wilayah operasional kelapa sawit. Total luas lahan konservasi yang kami kelola per 31 Desember 2016 mencapai 41.800,05 ha.

Khusus di Papua Barat, bersama dua anak perusahaan, kami menyiapkan dan mengelola area konservasi dengan luas 32.483,49 ha. Area konservasi ini berfungsi untuk melindungi ekosistem dan melestarikan habitat penting serta memelihara populasi dari setiap spesies yang dilindungi maupun spesies endemik di Papua Barat.

Beberapa tantangan kami dalam menjaga keanekaragaman hayati di antaranya adalah masih maraknya perburuan satwa yang dilindungi, khususnya di Papua Barat, dan minimnya pemahaman terhadap pentingnya menjaga kawasan dengan nilai konservasi tinggi. Untuk melindungi keberadaan flora dan fauna, kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan berusaha mencegah dan menghindari kebiasaan masyarakat menyalakan api yang dapat menyebabkan kebakaran hutan. Penerapan dan evaluasi atas praktik ini menjadi tanggung jawab Direktur Keberlanjutan Usaha.

Kami bertanggung jawab penuh atas kegiatan konservasi di seluruh wilayah operasional perusahaan kami. Meski demikian, kami menyadari keterbatasan Perusahaan dalam melakukan konservasi. Oleh sebab itu, kami juga membuka diri bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing agar konservasi berjalan dengan baik.

Kami berupaya melibatkan warga sekitar perkebunan sesuai dengan konteks dan karakteristik masyarakat. Salah satu pendekatan yang kami lakukan di Kalimantan Barat yaitu secara persuasif mendekati pelaku pembalakan liar untuk beralih menjadi mitra atau karyawan di perkebunan kelapa sawit. Di wilayah operasi Papua Barat, kami melibatkan masyarakat untuk menjaga daerah aliran sungai (DAS) Metemani, Kamundan dan Kais.

Jika memungkinkan, kami juga bekerja sama dengan institusi dari dalam dan luar negeri yang kompeten dalam melakukan konservasi. Di Kalimantan Barat, kami bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Universitas Tanjung Pura, The Nature Conservancy dan YIARI.

Tabel berikut menyajikan data dan informasi lahan konservasi, pengelolaannya dan pelibatan masyarakat lokal di setiap wilayah perkebunan kelapa sawit ANJ.

Tabel Pengelolaan Lahan Konservasi per 31 Desember 2016

Wilayah Perkebunan	Luas (Ha)	Lahan Konservasi		Pengelola Lahan Konservasi	Pelibatan Penduduk Lokal
		Luas (ha)	%		
Sumatera Utara I	9.321,95	324,58	3,48%	PT Austindo Nusantara Jaya Agri (ANJA)	Ya
Sumatera Utara II	9.171,82	2.271,88	24,77%	PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (ANJAS)	Ya
Belitung	16.276,84	1.736,93	10,67%	PT Sahabat Mewah dan Makmur (SMM)	Ya
Kalimantan Barat	12.940,81	3.844,52*	28,71%	PT Kayung Agro Lestari (KAL), The Nature Conservancy, YIARI dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)	Ya
Sumatera Selatan	12.800,00**	1.138,65	8,90%	PT Galempa Sejahtera Bersama (GSB)	Belum
Papua Barat	36.505,93	23.643,74	64,77%	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ)	Belum
Papua Barat	22.678,40	3.788,40	16,70%	PT Putera Manunggal Perkasa (PMP)	Ya
Papua Barat	32.025,14	5.051,35	15,77%	PT Permata Putera Mandiri (PPM)	Ya
Total	157.720,89	41.800,05	26,50%		

Catatan:

*) 2.330 ha dari area ini berada di luar HGU KAL

**) Status lahan masih berupa izin lokasi

Di ANJAS, kami bekerja sama dengan Conservation International-Indonesia (CI) sejak 2014 diawali ketika CI melaksanakan sosialisasi Sustainable Landscapes Partnership (SLP). Kedua belah pihak kemudian melakukan kerja sama dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Perusahaan menjadi narasumber pada seminar tentang praktik bisnis berkelanjutan karena ANJAS memiliki Sertifikat RSPO, ISPO, SMK3 dan ISO 14001.
2. Kebun kelapa sawit kami di ANJAS menjadi kebun percontohan dalam kegiatan studi banding Praktik Terbaik Pengelolaan Air, Pengelolaan Sistem Pengendalian Kebakaran serta pemberdayaan masyarakat di sekitar Perusahaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama UNDP, WWF dan Kementerian Pertanian.
3. Penanaman pohon di area konservasi ANJAS yang dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Selain menjaga dan merawat area konservasi, dalam rangka melestarikan keanekaragaman hayati, kami memiliki kebijakan untuk mengidentifikasi kawasan hutan lindung yang terdekat dari wilayah perkebunan. Hal ini penting untuk mengetahui flora dan fauna serta ekosistem di kawasan hutan lindung yang mungkin terdampak oleh kegiatan operasional perkebunan kami. Kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen Kebijakan Lingkungan, Kebijakan Konservasi, Kebijakan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Dilindungi, serta diturunkan menjadi SOP Pengelolaan NKT dan Sempadan Sungai yang telah disahkan pada 2016.

Sejauh ini kami telah mengidentifikasi kawasan yang dilindungi di Sumatera dan Kalimantan Barat yang berdekatan dengan wilayah operasional kami seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel Kawasan yang Dilindungi yang Berdekatan dengan Wilayah Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit

Lokasi Kebun dan Pabrik CPO	Kawasan Dilindungi Terdekat	
	Nama	Jarak (km)
Sumatera Utara I	Taman Nasional Batang Gadis	57
Sumatera Utara II	Hutan Lindung Siondop	Berbatasan langsung
Belitung	Hutan Lindung Senusur Sembulu	4
Kalimantan Barat	Taman Nasional Gunung Palung	2

Per 31 Desember 2016, kami telah mengidentifikasi dan melakukan upaya perlindungan spesies yang terancam kepunahannya berdasarkan daftar International Union for Conservation of Nature (IUCN), di antaranya:

1. *Anisoptera costata* Korth/Ifak (Mersawa)
2. *Eusideroxylon zwageri*/Ulin
3. *Nephentes sp*/Kantung semar
4. *Presbytis melalophos*/Simpai
5. *Symphalangus syndactylus*/Siamang

6. *Anisoptera grossivenia* V. Sloom./waeno
7. *Trachypitechus auratus*/lutung
8. *Pongo pygmaeus* ssp. *wurmbii*/orang utan Kalimantan
9. *Buceros rhinoceros*/rangkong badak
10. *Hylobates agilis*/owa-owa
11. *Helarctus malayanus*/beruang madu



Orang utan di kawasan konservasi KAL (Dokumentasi ANJ)

Pendekatan lain yang kami lakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati yaitu melalui kebijakan tanpa pembakaran (*zero burning*) dan melakukan antisipasi kebakaran hutan di wilayah perkebunan. Kami membangun menara-menara pantau, menyediakan alat pemadam kebakaran yang memadai, membentuk regu tanggap darurat kebakaran dan memiliki tim pemadam kebakaran yang siap diterjunkan jika wilayah kami mengalami kebakaran.

Kami juga bekerja sama dengan Manggala Agni dalam pelatihan, penyuluhan dan pembentukan komunitas peduli api serta melakukan pemantauan kondisi cuaca dan titik api di BMKG serta melalui SiPongi (aplikasi pendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan). Untuk mempertahankan kelembaban lahan kami membuat kanal-kanal dan *blocking canal* di wilayah perkebunan. Pemasangan tanda-tanda peringatan bahaya kebakaran juga dilakukan untuk mencegah terjadinya jatuh korban di wilayah yang mengalami kebakaran.

Selanjutnya, pencegahan dan penanggulangan kebakaran akan kami lakukan jika mulai terjadi kebakaran dalam radius 3 km terhitung dari batas luar wilayah perkebunan. Kebijakan ini kami gunakan pada Agustus 2016 ketika titik api terpantau di hutan desa Dusun II, Kuala Satong, Kabupaten Ketapang, pada jarak 1,7 km dari batas luar wilayah perkebunan Kalimantan Barat.

MENGELOLA LAHAN GAMBUT



Kunjungan KLHK ke perkebunan KAL 2016 (Dokumentasi ANJ)

Pemerintah Indonesia memberi perhatian yang tinggi terhadap lahan gambut karena lahan gambut menyimpan karbon dalam jumlah besar dan menjadi salah satu faktor penentu perubahan iklim.

Selain itu, pengelolaan lahan gambut juga menjadi hal yang penting guna mendukung pencapaian target penurunan karbon oleh pemerintah.

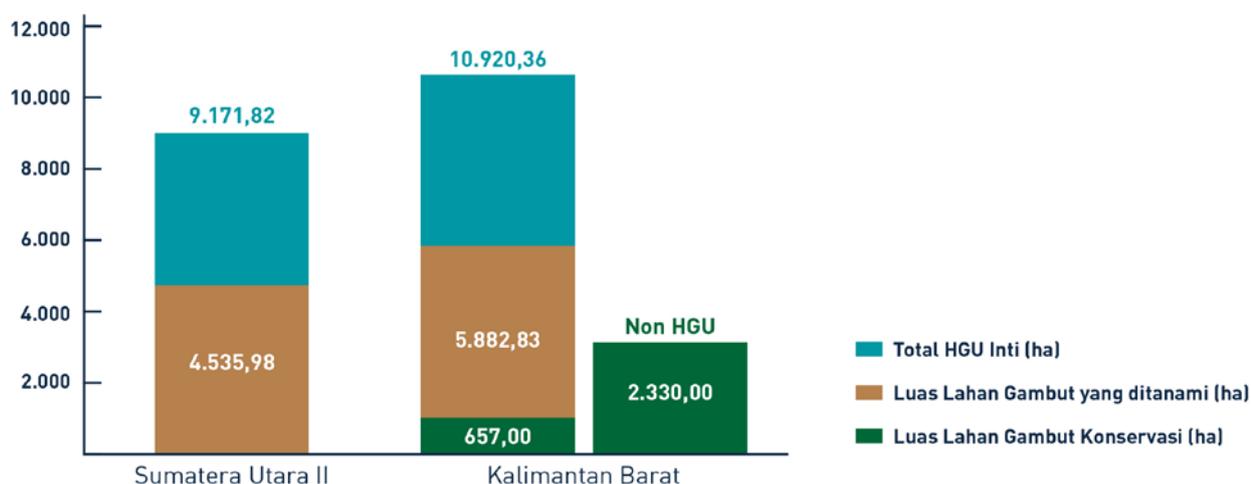
Sejak awal 2016, Pemerintah Indonesia melalui Perpres No. 1/2016 membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG). Lembaga tersebut mengkoordinir pengelolaan 20 juta ha lahan gambut di Indonesia yang tersebar terutama di Sumatera, Kalimantan dan Papua (sumber: www.menlh.go.id). BRG juga bertugas untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut serta melakukan koordinasi dan fasilitasi restorasi lahan gambut.

Kepedulian terhadap lingkungan dan keseriusan Pemerintah Indonesia memperhatikan lahan gambut menjadi landasan utama kami untuk menempatkan isu pengelolaan lahan gambut sebagai aspek yang material dalam laporan ini. Selain itu, sebagai anggota RSPO, kami juga menyadari dan mematuhi kebijakan RSPO yang melarang anggotanya untuk mengembangkan perkebunan di wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi (*high conservation value/HCV*).

Per 31 Desember 2016, kami mencatat luas lahan gambut sebesar 11.075,82 ha atau 55,12% dari total luas area perkebunan di Sumatera Utara II dan Kalimantan Barat. Khusus untuk wilayah Sumatera Utara I dan Sumatera Selatan, kami tidak menemukan lahan gambut di wilayah perkebunan tersebut. Di Papua Barat, berdasarkan analisis Kementerian Pertanian pada 2014, tidak ada indikasi lahan gambut di wilayah perkebunan kami.

Berikut adalah grafik yang menyajikan data luasan lahan gambut di wilayah perkebunan kami per 31 Desember 2016.

Grafik Total Luas Lahan dan Lahan Gambut di Wilayah Perkebunan Sumatera Utara II dan Kalimantan Barat per 31 Desember 2016



Pengelolaan lahan gambut di wilayah perkebunan kami dilakukan dengan mengacu pada ketentuan, yaitu:

1. Peraturan Kementerian Pertanian No. 14/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit.
2. Peraturan Pemerintah No. 71/2014 jo No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Sejalan dengan kebijakan *zero burning* yang kami miliki, kami juga mengelola dan memanfaatkan air di wilayah lahan gambut untuk mencegah kebakaran dan pelepasan karbon. Kebijakan dan pendekatan tersebut kami terapkan secara konsisten, terukur dan terawasi di Sumatera Utara II dan Kalimantan Barat.

MENGENDALIKAN HAMA

Kerusakan tanaman karena hama merupakan salah satu risiko bisnis yang kami hadapi dalam mengelola perkebunan kelapa sawit. Di sisi lain, pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida atau bahan kimia yang berlebihan justru akan berdampak negatif bagi lingkungan.

Terkait hal tersebut, kami menggunakan pendekatan yang ramah lingkungan dalam mengendalikan hama. Hal tersebut tertuang dalam standar operasional kami mengenai pengamatan dan pengendalian hama terpadu (*integrated pest management*), khususnya SOP AGR 20.

Sejauh ini proses pengendalian hama yang dilakukan cukup efektif. Hasilnya menunjukkan kerusakan yang timbul akibat ulat, kumbang, tikus dan rayap sangat ringan dan dapat dikendalikan. Ke depan, kami akan mempertahankan praktik pengendalian hama ramah lingkungan, termasuk juga di lahan pengembangan di wilayah Papua Barat dan Sumatera Selatan.

Tabel berikut berisi data dan informasi mengenai pengelolaan hama di wilayah perkebunan kami.

Tabel Pengendalian Hama di Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit PT Austindo Nusantara Jaya Tbk

Jenis Hama	Bentuk Pengendalian	Hasil
Ulat Pemakan Daun	Kutip Ulat	Terkendali, ulat generasi kedua tidak muncul
	Penyemprotan menggunakan bakteri <i>Bacillus thuringiensis</i>	Tidak ada serangan baru
	Pengasapan bakteri (<i>Bacillus thuringiensis</i> , Bio fogger K22 bio)	
	Intensif penanaman <i>beneficial plant</i> seperti <i>Turnera subulata</i> , <i>Antigonon</i> dan <i>Cassia cobanensis</i>	
	Penggunaan kimia kelas II digunakan hanya bila populasi tinggi	
Ulat Buah Tirathaba	Penyemprotan bakteri <i>Bacillus thuringiensis</i>	Terkendali, bunga tumbuh dengan baik
		Serangan baru sangat ringan

Jenis Hama	Bentuk Pengendalian	Hasil
Kumbang Oryctes	Kutip larva Penaburan karbosulfan di pucuk Kebijakan kompos	Serangan baru sangat ringan
Tikus	Pemasangan kandang burung hantu <i>Tyto alba</i> Penggunaan racun tikus yang terukur hanya bila populasi tikus meningkat	Terkendali, kerusakan buah karena tikus ringan
Rayap	Pemantauan rutin Penggunaan Fipronil	Terkendali, serangan rayap sangat ringan



Erik Meijaard

Honorary Professor, Center of Excellence for Environmental Decisions and Chair, IUCN Oil Palm Task Force

Saya telah bekerja sama selama empat tahun dengan salah satu perusahaan Grup ANJ, PT Kayung Agro Lestari (KAL) di Kalimantan Barat, dan terlibat sejak awal dalam merancang program konservasi. Saya menilai dampak terhadap hutan juga perlu dilihat jika tidak ada perkebunan kelapa sawit.

Grup ANJ telah melaksanakan rekomendasi kami dalam mengatasi perambahan hutan secara liar, mengurangi kebakaran hutan dan pencurian di wilayah konservasi. Perusahaan juga membantu studi lain tentang manfaat penyerbukan dari hutan dan riset ekologi orang utan di perkebunan kelapa sawit. Saat ini tercatat sekitar 150 orang utan dan satwa liar lain yang terancam punah di sekitar wilayah yang ada dalam pengelolaan Perusahaan. Orang utan tersebut justru lebih aman di wilayah konservasi Perusahaan dibandingkan orang utan di wilayah lain.

Secara umum, Grup ANJ telah melakukan banyak hal dalam mencapai keberlanjutan lingkungannya, namun tentu selalu ada ruang untuk melakukan lebih banyak lagi. Hal yang perlu ditekankan yaitu dengan berkurangnya wilayah hutan di wilayah KAL, peran KAL dalam melakukan konservasi wilayah menjadi sangat penting.



Sudirman

Karyawan konservasi PT Kayung Agro Lestari (KAL), mantan pelaku perambah hutan secara ilegal

Dahulu saya terpaksa merambah hutan secara ilegal karena lapangan pekerjaan sangat minim. Pada 2014 saya terjaring razia yang dilakukan Polsek Matan Hilir Utara dan KAL di areal HCV 2.330 ha. Namun itu menjadi titik balik bagi saya untuk dapat menjalani pekerjaan yang legal dan halal.

Secara khusus saya meminta untuk menjadi karyawan konservasi KAL. Saya sadar bahwa pekerjaan dahulu membuat hutan semakin gundul dan kehilangan satwa liar. Sekarang, selain mendapat penghasilan rutin, hidup saya jauh lebih tenang.



Rizal Algamar

Country Director, The Nature Conservancy Indonesia

Grup ANJ telah menunjukkan komitmen yang kuat menuju keberlanjutan melalui anak perusahaannya yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit yakni PT Kayung Agro Lestari (KAL). Melalui operasi usahanya, KAL telah mendorong kegiatan konservasi hutan bernilai tinggi yang menjadi rumah bagi orang utan di wilayah Ketapang, Kalimantan Barat. Perusahaan juga telah berkolaborasi dengan beragam pemangku kepentingan utama – pemerintah, komunitas lokal, universitas dan organisasi non pemerintah (NGO). Secara internal KAL juga memperlihatkan komitmennya melalui penguatan kapasitas dalam konservasi, layanan manajemen lingkungan, survei keanekaragaman hayati, patroli dan juga kepedulian komunitas dalam keberlanjutan penggunaan sumber daya alam.

The Nature Conservancy Indonesia melalui afiliasi lokalnya Yayasan Konservasi Alam Nusantara saat ini bekerjasama dengan KAL dalam pengelolaan kawasan konservasi dengan membangun strategi pengelolaan bentang alam, menciptakan kemitraan dengan para pemangku kepentingan utama dan pemberdayaan komunitas.

MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN LIMBAH

[G4-DMA Effluents and Waste]



Pengelolaan limbah di ANJAS (Dokumentasi ANJ)

Dalam konteks pengelolaan lingkungan, limbah kelapa sawit menjadi isu yang material karena jumlahnya yang cukup besar. Oleh sebab itu kami memiliki kebijakan *zero waste* untuk meminimalkan limbah kelapa sawit yang dihasilkan.

Limbah tersebut berasal dari cangkang kelapa sawit (*palm kernel shell*) dan serat dari tandan kosong kelapa sawit. Cangkang kelapa sawit merupakan kulit keras bagian dalam yang membungkus inti sawit, sedangkan tandan kosong kelapa sawit merupakan limbah dari tandan pembungkus kelapa sawit.

Terdapat tiga pendekatan dalam mengelola dan memanfaatkan limbah kelapa sawit di wilayah operasional. Pertama yaitu penggunaan serat tandan kosong dan cangkang inti kelapa sawit untuk pupuk (*land application*) di wilayah perkebunan.

Cangkang inti dan serat tandan kosong pada perkebunan kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kesuburan tanah, terutama penambahan unsur fosfor dan kalium. Selain itu, aplikasi cangkang inti dan serat tandan kosong pada lahan perkebunan dapat mempertahankan kelembaban tanah sehingga mengurangi penguapan air permukaan tanah. Serat tandan kosong kelapa sawit juga dapat meningkatkan aktivitas biologi di dalam tanah sehingga dapat memperbaiki struktur tanah.

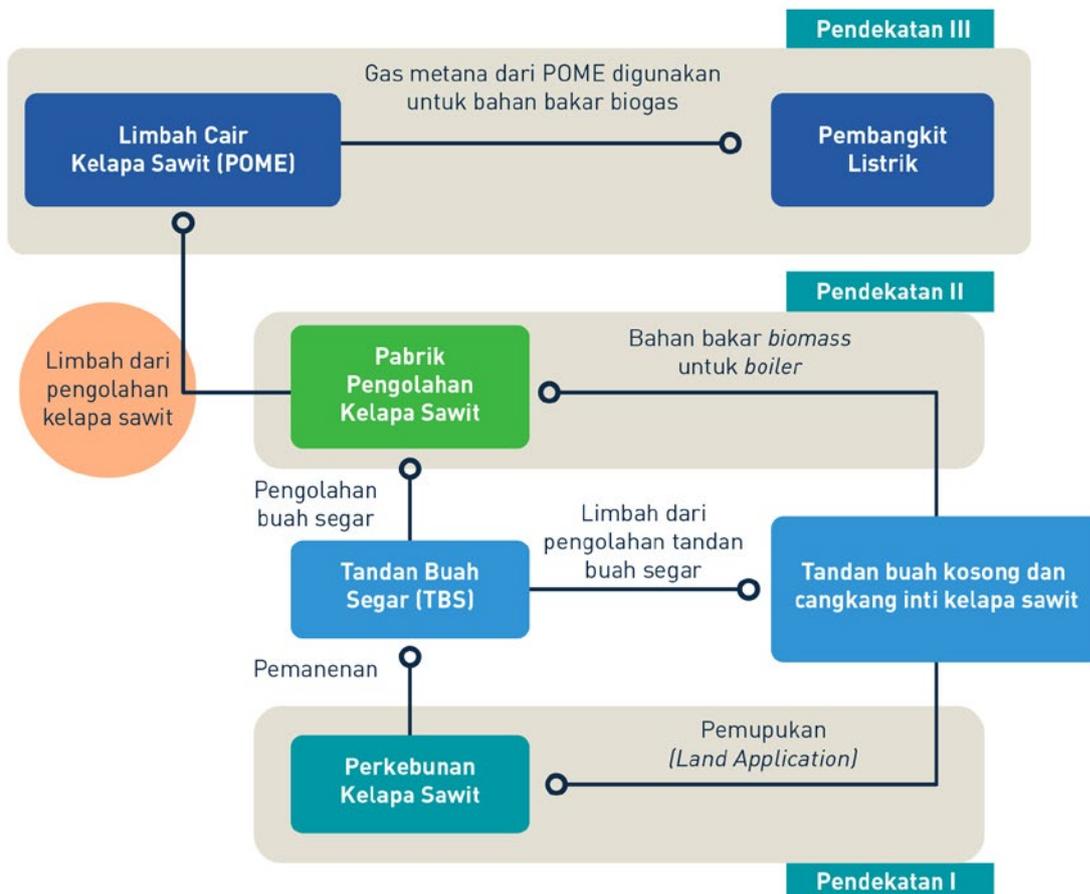
Pendekatan kedua yaitu memanfaatkan limbah serat tandan kosong dan cangkang inti menjadi bahan bakar *biomass* untuk *boiler* yang berada di pabrik pengolahan kelapa sawit. Uap dari *boiler* kemudian disalurkan ke pembangkit energi listrik. Dengan demikian, kami menggunakan sumber energi internal untuk kegiatan pengolahan kelapa sawit.

Pendekatan yang ketiga adalah pemanfaatan limbah cair dari pabrik pengolahan kelapa sawit atau yang disebut *palm oil mill effluent* (POME). Sejauh ini pabrik kami di Belitung berhasil menangkap gas metana dari POME menjadi bahan bakar biogas untuk pembangkit listrik. Kemudian, listrik tersebut dijual dan disalurkan ke jaringan listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN). Praktik pembangunan pembangkit listrik biogas ini di masa depan akan kami jalankan juga di wilayah operasional Sumatera Utara I dan II serta Kalimantan Barat untuk kebutuhan Perusahaan sendiri, termasuk kebutuhan program pengembangan masyarakat sekitar.

Pada laporan keberlanjutan yang pertama ini, kami belum menyajikan data pemanfaatan dan pengolahan limbah secara rinci.

Diagram berikut ini memberi gambaran kepada para pembaca mengenai skema pemanfaatan dan pengolahan tandan buah kosong, cangkang kelapa sawit dan POME untuk meminimalkan limbah

Diagram Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit



MENGENDALIKAN EMISI GAS RUMAH KACA [G4-DMA Emission]



Keindahan alam pagi hari di operasi biogas AANE (Dokumentasi ANJ)

Pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan aspek material dalam lingkup pengelolaan lingkungan yang perlu disajikan dalam laporan ini karena beberapa hal. Pertama, pengendalian emisi GRK memberikan kontribusi secara positif terhadap pengendalian perubahan iklim. Kedua, kami berkomitmen memenuhi ketentuan RSPO, ISPO dan ISCC untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengurangi emisi GRK.

Ketiga, perusahaan kami sepakat untuk menjalankan kegiatan operasi yang sejalan dengan misi pemerintah menurunkan emisi GRK. Hal tersebut tertuang dalam berbagai regulasi, khususnya yang sesuai dengan regulasi tentang emisi GRK, yaitu:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71/2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
3. Peraturan Presiden No. 62/2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 15/2013 tentang Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.

Sepanjang 2016 kami melakukan pemantauan emisi yang bersumber dari lahan dan pabrik pengolahan kelapa sawit. Pemantauan emisi berada di bawah fungsi *Environment, Health and Safety* dan menjadi tanggung jawab *Chief Operational Officer* (COO).

Intensitas dan jumlah emisi GRK tertinggi di wilayah perkebunan dan operasional kami pada 2016 berasal dari Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan, sesuai dengan usia pohon, produktivitas perkebunan di wilayah tersebut masih rendah ($\pm 10,41$ ton/ha) sedangkan pemakaian komponen produksi relatif sama dengan lahan lainnya. Meski demikian, emisi GRK di Kalimantan Barat akan turun dari tahun ke tahun sesuai dengan peningkatan produktivitas. Emisi GRK turun dari 35,26 ton CO₂ eq/ton CPO tahun sebelumnya menjadi 28,12 ton CO₂ eq/ton CPO pada 2016.

Emisi GRK di wilayah perkebunan Sumatera Utara I memiliki intensitas 1,68 ton CO₂ eq/ton CPO pada 2016, naik dari 1,46 ton CO₂ eq/ton CPO pada tahun sebelumnya. Kenaikan emisi GRK terjadi karena produksi TBS di Sumatera Utara I menurun akibat proses peremajaan kebun (*replanting*).

Untuk wilayah Sumatera Utara II, intensitas emisi GRK relatif masih sama dibanding tahun sebelumnya. Di Belitung, intensitas emisi GRK menurun dari 4,84 ton CO₂ eq/ton CPO pada 2015 menjadi 4,23 ton CO₂ eq/ton CPO pada 2016 karena adanya kenaikan produksi. Emisi di pabrik pengolahan kelapa sawit kami di Belitung sangat kecil akibat inisiatif *zero waste* dan energi *biomass* di pabrik tersebut, sehingga tercantum kosong di dalam tabel emisi.

Berikut ini tabel yang memuat data beban emisi GRK dan intensitas emisi GRK untuk jangka waktu Januari hingga Desember 2016 di wilayah perkebunan kelapa sawit yang sudah berproduksi.

Tabel Jumlah Beban Emisi dan Intensitas Emisi GRK di Lahan Produksi per 31 Desember 2016 [G4-EN15] [G4-EN18]

Wilayah Operasi	Intensitas Emisi		
	Emisi Lahan Ton CO ₂ eq / Ton TBS	Emisi Pabrik Ton CO ₂ eq / Ton TBS	Emisi Produk Ton CO ₂ eq / Ton TBS
Sumatera Utara I	0,30	0,14	1,68
Sumatera Utara II	1,24	0,21	4,11
Belitung	0,91	-	4,23
Kalimantan Barat	7,05	0,11	28,12

Wilayah Operasi	Total Emisi		
	Emisi Lahan Ton CO ₂ eq	Emisi Pabrik Ton CO ₂ eq	Emisi Produk Ton CO ₂ eq
Sumatera Utara I	82.168,38	38.345,25	96.068,14
Sumatera Utara II	304.975,84	51.649,13	221.727,27
Belitung	201.461,34	-	194.354,88
Kalimantan Barat	705.384,79	11.006,00	573.051,83



SEJAHTERA
BAGI SEMUA

2



MERANGKUL PEMANGKU KEPENTINGAN



Temu pemangku kepentingan di ANJA (Dokumentasi ANJ)

Dalam menjalankan kegiatan usaha yang bertanggung jawab sosial, kami menyelaraskan visi usaha kami dengan pelestarian lingkungan hidup dan kepentingan para pihak yang berada atau terdampak di ruang lingkup operasional perkebunan kami. Oleh sebab itu, kami mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan dengan memperhatikan ISO 26000 Guidance for Social Responsibility (ISO 26000:2010) dan AA1000:2011 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) 2015 sebagai acuan Perusahaan.

Sebagai landasan awal, kami memetakan pemangku kepentingan dan isu terkait melalui pemetaan sosial (*social mapping*) pada masing-masing wilayah perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar kami untuk mengambil keputusan strategis dalam mengatasi permasalahan dan menjalin relasi dengan para pemangku kepentingan. [G4-SO1]

Secara umum, hasil pemetaan yang dilakukan telah berhasil mengidentifikasi pemangku kepentingan dan isu-isu utama terkait aspirasi dan harapan pemangku kepentingan. Selain itu, kami juga mengidentifikasi harapan tokoh masyarakat lokal untuk dilibatkan dalam proses pengembangan wilayah perkebunan, kemitraan dengan masyarakat, perekrutan tenaga kerja lokal dan inisiatif pemberdayaan masyarakat.

Kami menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan, antara lain melalui konsultasi, negosiasi, kerja sama, kolaborasi,

kemitraan dan pemberdayaan, yang disesuaikan dengan isu dan karakteristik pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang beragam tersebut, kami berupaya menciptakan hubungan konstruktif dengan para pemangku kepentingan sesuai dengan situasi, kondisi dan konteks permasalahan yang ada.

Pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi dan signifikan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit secara umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel Pemangku Kepentingan, Topik Pembahasan dan Pendekatan yang Dilakukan Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan [G4-24] [G4-25] [G4-26] [G4-27]

Pemangku Kepentingan	Topik Pembahasan	Pendekatan dan Respons Perusahaan	Frekuensi Pendekatan
Pemegang Saham dan Investor	1 Fluktuasi harga CPO dunia 2 Peningkatan tata kelola Perusahaan	a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)	• RUPS minimal 1 kali setiap tahun • Penerbitan RKAP setiap awal tahun
Karyawan dan Pekerja	3 Efisiensi dan produktivitas 4 Penguatan posisi dan penguasaan pasar 5 Pelibatan tenaga kerja lokal 6 Pemenuhan hak-hak normatif karyawan dan pekerja 7 Keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial 8 Kepatuhan hukum	c. berkala laporan kinerja Perusahaan, laporan tahunan dan laporan keberlanjutan d. Pertemuan <i>public expose</i> , penerbitan <i>investor newsletters</i> e. Pertemuan berkala dan terjadwal dengan setiap fungsi serta serikat pekerja f. Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	• Pelaporan kinerja Perusahaan bulanan triwulan, 6 bulan dan tahunan • Dialog dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan • Pembaharuan PKB setiap dua tahun
Pemimpin dan Tokoh Lokal	1 Pelibatan dalam proses pengembangan perkebunan dan akuisisi lahan 2 Pelibatan dalam proses perencanaan program pemberdayaan masyarakat, evaluasi serta pemantauan 3 Pelibatan dalam pertimbangan proses perekrutan tenaga kerja lokal dan petani kelapa sawit sebagai mitra 4 Pemasok lokal dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa	a. Pelaksanaan sosialisasi setiap tahapan akuisisi lahan sesuai kesepakatan b. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sesuai kesepakatan c. Pemantauan dan evaluasi setiap tahapan akuisisi lahan d. Pemantauan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan petani kelapa sawit sebagai mitra e. Penyampaian informasi perekrutan tenaga kerja lokal dan petani.	• Sesuai kebutuhan, minimum dua kali per tahun
Pemerintah Pusat Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida)	1 Kontribusi ANJ pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial 2 Dukungan pada praktik-praktik tata kelola Perusahaan yang baik dan praktik-praktik keberlanjutan Kepatuhan pada ketentuan	a. Kesertaan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) daerah b. Koordinasi penerapan program CSR dengan aparat satuan kerja pemerintahan daerah (SKPD)	• Sesuai kebutuhan, minimum dua kali per tahun

Pemangku Kepentingan	Topik Pembahasan	Pendekatan dan Respons Perusahaan	Frekuensi Pendekatan
	3 hukum yang berlaku dan prakarsa eksternal lain 4 Konsultasi dan asistensi terkait kasus-kasus perselisihan lahan serta upaya penyelesaian yang dilakukan	c. Dialog dan kerja sama d. Fasilitasi dan mediasi e. Penyusunan dan pelaporan terkait CSR atau inisiatif sosial untuk beberapa kebun	
Pelanggan Pemasok dan Mitra Bisnis	1 Dukungan praktik-praktik pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan prakarsa eksternal lain 2 Kepatuhan ketentuan hukum yang berlaku 3 Transparansi tender dan jaminan kontrak pekerjaan	a. Sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) b. Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) c. Kontrak kerja sama	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan berkala sertifikasi RSPO dan ISPO setiap tahun • Evaluasi berkala sesuai kebutuhan terkait pelaksanaan kontrak kerja sama yang disepakati
Media Massa Lembaga Swadaya Masyarakat	1 Transparansi dan akuntabilitas operasi Perusahaan 2 Konsultasi, asistensi dan kerja sama penyusunan, pelaksanaan serta evaluasi pengembangan usaha terkait isu-isu perkebunan kelapa sawit berkelanjutan 3 Keterbukaan informasi	a. Pertemuan dan diskusi (FGD) b. Kerja sama riset dan penelitian c. Penyampaian informasi dan materi pemberitaan secara berkala kepada media terkait kinerja serta aksi korporasi d. Penyusunan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan e. Kerja sama pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai kebutuhan, pertemuan berkala minimum dua kali per tahun
Masyarakat Lokal Petani Mitra (Skema Inti Plasma Manajemen Satu Atap)	1 Transparansi dan akuntabilitas operasi Perusahaan serta dukungan pada praktik-praktik pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan 2 Pengembangan mekanisme penerapan program pengembangan masyarakat 3 Pelibatan petani kelapa sawit lokal dan tenaga kerja lokal	a. Mekanisme pelaporan dan pengaduan dari masyarakat serta tindak lanjutnya b. Pelaporan pemantauan penerapan program pemberdayaan masyarakat c. Rekrutmen terbuka petani kelapa sawit dan karyawan lokal d. Pendampingan kepada petani e. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di luar petani, misalnya koperasi kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai kebutuhan, minimum dua kali per tahun

Kami menyadari bahwa pemangku kepentingan mungkin masih memiliki aspirasi dan keluhan meski kami telah melakukan pendekatan yang kami pandang terbaik. Jika terjadi keluhan, pemangku kepentingan dapat menggunakan mekanisme yang kami sediakan untuk menyampaikan pengaduan, baik dari masyarakat maupun pihak-pihak lain.

Bagi karyawan, keluhan dapat dilaporkan melalui *value champions* dan fungsi *employee relations*.

Selain itu, kami memiliki *whistleblowing system* (WBS) yang menerima laporan internal dan eksternal untuk peristiwa yang mengindikasikan terjadinya kecurangan, praktik korupsi, pelanggaran etika bisnis serta peraturan perusahaan.



Laporan dapat disampaikan melalui:

SMS: 0811 999 3553

E-mail: WBS@anj-group.com

MENERAPKAN *FREE PRIOR INFORMED CONSENT* [G4-DMA Indigenous Rights]



Temu pemangku kepentingan di Papua Barat (Dokumentasi ANJ)

Lahan perkebunan kami yang dekat dengan masyarakat adat atau masyarakat lokal di Pulau Sumatera, Belitung, Kalimantan dan Papua memberi ciri khas tersendiri bagi kegiatan operasional perusahaan kami.

Proses akuisisi dan pengembangan serta pengelolaan lahan perkebunan terkait erat dengan masyarakat lokal sebagai pemilik lahan. Berdasarkan hal tersebut, kami perlu menghargai dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat lokal.

Sebagai anggota RSPO, kami wajib menjalankan prinsip *free, prior informed consent* (FPIC) atau persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) atau disebut juga dengan keputusan bebas didahulukan dan diinformasikan (KBDD) dalam menjalin hubungan dengan masyarakat lokal dan mengembangkan serta mengelola lahan perkebunan. Melalui KBDD, kami wajib menghormati dan menghargai hak masyarakat lokal sebagai pemilik lahan yang dapat menyetujui atau menolak pengembangan usaha kami.

Lebih jauh lagi, kami harus bersedia berdialog dan bernegosiasi, menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta memberi pilihan kepada masyarakat dalam akuisisi lahan atau bermitra dengan Perusahaan. Hal tersebut wajib kami lakukan dengan niat baik dan bersikap menerima keputusan yang diambil oleh masyarakat. Untuk menunjang penerapan KBDD,

kami mendorong terbentuknya panitia pembebasan lahan yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat dan institusi yang berwenang.

KBDD menekankan pada pencegahan konflik lahan dengan masyarakat lokal. Untuk itu, kami mendokumentasikan persetujuan kolektif masyarakat lokal atas proses transaksi jual beli lahan dan kompensasi yang diberikan. Jika terjadi sengketa lahan, kami melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), hak-hak masyarakat lokal dan secara terus-menerus membangun serta membina hubungan berdasarkan manfaat bersama tanpa menggunakan unsur kekerasan.

Praktik KBDD sesuai dengan kebijakan keberlanjutan perusahaan kami dan sejalan dengan prinsip RSPO dan ISPO serta ISO 26000. KBDD juga menjadi landasan kami untuk menjalankan bisnis yang inklusif guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan.

Meski telah menerapkan KBDD, kami menyadari bahwa sengketa lahan masih dapat terjadi di wilayah perkebunan kami. Hingga akhir 2016, masih terdapat beberapa perselisihan dengan pihak-pihak yang melakukan klaim kepemilikan atas sebagian lahan yang dikuasai dan diusahakan oleh perusahaan kami.

MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA

[G4-DMA Child Labour, Forced or Compulsory Labour, and Security Practices]



Senyum cerah anak Papua (Dokumentasi ANJ)

Hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu isu yang cukup signifikan di wilayah perkebunan kelapa sawit. Hal ini disebabkan antara lain rendahnya tingkat kesejahteraan yang dapat memicu para pekerja, pemasok dan mitra mengikutsertakan anak di bawah umur untuk turut membantu bekerja di wilayah perkebunan kelapa sawit.

Pelanggaran HAM juga dapat merusak hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan secara langsung dan tidak langsung, termasuk juga berdampak negatif atas persepsi publik tentang Perusahaan.

Terkait dengan HAM, kami memiliki kebijakan dan prosedur untuk menghindari tindakan kerja paksa dalam bentuk apapun, tidak mempekerjakan anak di bawah umur dan menerapkan praktik keamanan wilayah yang menghindari kekerasan dan memperhatikan HAM. Saat ini, kami memiliki 304 petugas keamanan, 226 di antaranya telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi dari Kepolisian, yang juga mencakup pengetahuan terkait HAM. Selain itu, kami juga mewajibkan para pemasok dan mitra untuk tidak melakukan pelanggaran HAM di wilayah perkebunan masing-masing. [G4-HR5] [G4-HR6] [G4-HR7]

Hubungan Industrial serta Hak Berserikat dan Berkumpul

Kami memperhatikan sumber daya manusia di perusahaan dengan membuka komunikasi hubungan industrial serta menghargai hak untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan. Hak untuk mengungkapkan pendapat dan berdiskusi antara karyawan dan manajemen Perusahaan diwujudkan dengan pembentukan Lembaga Kerja sama (LKS) Bipartit pada masing-masing wilayah perkebunan berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. Kep.255/Men/2003 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit.

LKS Bipartit secara periodik menjadi wadah antara karyawan dan manajemen Perusahaan untuk berdialog dan membahas isu-isu hubungan industrial, termasuk mengenai Perjanjian Kerja Bersama (PKB), kesejahteraan tenaga kerja dan strategi penanganan kesehatan dan keselamatan karyawan di tempat kerja. Saat ini PKB kami telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan diberlakukan bagi seluruh karyawan tetap. Setiap dua tahun, PKB tersebut akan didiskusikan dan diperbaharui kembali melalui forum LKS Bipartit. [G4-11]

MENINGKATKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA [G4-DMA Occupational Health and Safety]



Komitmen terhadap keselamatan kerja (Dokumentasi ANJ)

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan isu yang material di wilayah operasional. Kami memandang sumber daya manusia bukan sebagai faktor produksi, tetapi merupakan salah satu pemangku kepentingan yang utama dan oleh sebab itu perlu dijaga keselamatannya di tempat kerja.

Hal ini juga sejalan dengan visi kami untuk menerapkan praktik bisnis yang beretika dan bertanggung jawab sosial dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan karyawan kami. Di sisi lain, produktivitas Perusahaan juga dipengaruhi oleh kenyamanan karyawan yang merasa aman bekerja di wilayah perkebunan.

Isu keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami wajib mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang mencakup juga keselamatan dan kesehatan kerja sebagai tanggung jawab Perusahaan. Beberapa regulasi tersebut antara lain UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 50/2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Berdasarkan hal tersebut, kami menerapkan kebijakan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk meminimalkan insiden dan mencapai target *zero accident* (tanpa kecelakaan), terutama di wilayah perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit. Penerapan kebijakan, sistem manajemen K3 dan pencapaian target *zero accident* menjadi tanggung jawab seluruh karyawan di semua tingkatan di bawah pengawasan Direktur Hubungan Pemerintah, Keamanan dan K3, serta pimpinan Departemen *Environment, Health and Safety* (EHS).

Dalam rangka meminimalkan insiden kecelakaan kerja, kami mengidentifikasi jenis pekerjaan berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan di wilayah perkebunan maupun pada pabrik pengolahan kelapa sawit. Kami melakukan mitigasi terhadap potensi insiden kecelakaan kerja dengan berbagai pendekatan sesuai dengan kebutuhannya, di antaranya penerapan skema perizinan, penggunaan sistem Lockout Tagout (LOTO), pembuatan *speed trap* dan penggunaan alat pelindung diri (APD).

Selain melakukan identifikasi dan mitigasi pada jenis pekerjaan berisiko tinggi terhadap K3, kami juga menganalisis jenis pekerjaan tertentu yang berisiko bagi perempuan dan ibu hamil. Salah satu kegiatan kami yang memiliki risiko tinggi yaitu pemupukan atau pembasmian hama karena adanya zat kimia yang digunakan, walaupun dalam batasan yang diizinkan. Kami memiliki kebijakan yang melarang perempuan atau ibu hamil untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Berikut ini tabel yang menyajikan informasi tentang jenis pekerjaan berisiko tinggi terhadap K3 dan potensi serta mitigasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya insiden kecelakaan kerja di wilayah perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit.

Tabel Jenis Pekerjaan Berisiko Tinggi, Potensi dan Mitigasinya di Wilayah Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit [G4-LA7]

Jenis Pekerjaan	Potensi	Mitigasi
Risiko di Wilayah Perkebunan		
Panen TBS	Terpotong, tertimpa buah	Pemakaian sarung egrek, perizinan untuk panen di jalur listrik, penerapan sudut egrek, pemakaian helm dan kacamata K3
Transportasi karyawan	Terjatuh	Larangan duduk di atas atap kabin/di dinding bak, pemakaian helm, pembuatan "polisi tidur" (<i>speed trap</i>) di persimpangan, pembatasan kecepatan
Pengangkutan TBS	Tertimpa buah	Pemakaian jaring pengaman, pembatasan kecepatan
Penggunaan pestisida	Keracunan	Pemakaian alat pelindung diri lengkap (sarung tangan, masker, kacamata, rompi dan sepatu K3).

Jenis Pekerjaan	Potensi	Mitigasi
Risiko di Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit		
Pengoperasian peralatan mesin	Tersetrum, terpotong, terjepit dan terbakar	Perizinan, pemakaian sistem LOTO pada saat perbaikan dan pemakaian alat pelindung diri (APD)
Pengelasan	Terbakar dan tersetrum	Perizinan, pemakaian sarung tangan las, <i>wear pack</i> las, masker dan kacamata las
Penggunaan bahan kimia	Keracunan dan terpercik	Pemakaian masker kimia, sarung tangan dan kacamata
Bekerja pada ketinggian	Terjatuh	Perizinan, pemakaian <i>safety harness</i> , pemasangan perancah yang terstandar
Memasuki ruang terbatas (<i>confined space</i>)	Keracunan	Perizinan, pemakaian <i>blower</i> dan pemakaian <i>breathing apparatus (BA)</i> atau alat bantu pernapasan

Lebih jauh lagi, kami melakukan mitigasi dan penanganan K3 sesuai dengan ketentuan pemerintah. Salah satunya yaitu dalam hal pemantauan kebisingan, bau dan getaran di pabrik pengolahan kelapa sawit. Kami menggunakan acuan regulasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.13/Men/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 50/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.

Secara teratur, kami melakukan pencatatan atas insiden kecelakaan kerja berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep.84/BW/1998 tanggal 8 April 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian dan Penggunaan Formulir Pemeriksaan dan Pengkajian serta Analisis Statistik Kecelakaan.

Jika ditinjau dari lokasi perkebunan, Sumatera Utara II memiliki jumlah insiden kecelakaan kerja yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Intensitas kegiatan yang tinggi di wilayah Sumatera I dan II sehingga memiliki risiko K3 yang cukup tinggi juga dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini tercermin pada hasil produksi CPO Sumatera Utara I dan II yang mencapai lebih dari 50 juta ton per tahun dalam dua tahun terakhir, meski jumlah luasan lahannya masing-masing lebih kecil dari wilayah perkebunan kami di Belitung dan Kalimantan Barat.

Pada 2016 kami mengalami satu *fatality* yang terjadi di wilayah perkebunan Sumatera Utara I. Insiden terjadi karena korban mengabaikan prosedur kerja tentang keselamatan panen di jalur listrik PLN dan ketentuan izin kerja. Selain itu, pengawasan oleh mandor saat itu juga lemah. Ini merupakan catatan penting bagi kami karena sebelumnya kami mendapatkan penghargaan SMK3 untuk wilayah operasi kami di Sumatera Utara I untuk periode kinerja 2015.

Agar tidak terulang kembali, kami meningkatkan pengawasan dan merevisi prosedur panen di wilayah jaringan listrik PLN. Tindakan tegas kami berikan bagi yang melanggar prosedur tersebut. Kami juga melakukan sosialisasi mengenai insiden yang telah terjadi dan memberikan pelatihan ulangan K3 kepada para karyawan.

Data mengenai jumlah insiden kecelakaan kerja berdasarkan klasifikasi insiden dan wilayah perkebunan untuk periode 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Jumlah Insiden Kecelakaan Kerja Berdasarkan Tingkat Kecelakaan Kerja dan Wilayah Perkebunan Produksi per 31 Desember 2015 dan 2016 [G4-LA6]

Wilayah Perkebunan	Tingkat Kecelakaan Kerja	Jumlah Insiden		Total Dalam 2 Tahun Terakhir
		2016	2015	
Sumatera Utara I	Ringan	1	1	2
	Sedang dan Berat	2	1	3
	Fatal	1	0	1
	Total	4	2	6
Sumatera Utara II	Ringan	2	3	5
	Sedang dan Berat	3	2	5
	Fatal	0	0	0
	Total	5	5	10
Belitung	Ringan	1	0	1
	Sedang dan Berat	1	2	3
	Fatal	0	0	0
	Total	2	2	4
Kalimantan Barat	Ringan	2	1	3
	Sedang dan Berat	0	3	3
	Fatal	0	0	0
	Total	2	4	6
Total Jumlah Kecelakaan Kerja		13	13	26

Insiden kecelakaan kerja yang terjadi di wilayah perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit berdampak pada hilangnya sejumlah jam kerja. Kehilangan jam kerja terbesar terjadi di Sumatera Utara II pada 2016 karena meningkatnya jumlah insiden sedang dan berat. Pada tahun yang sama, kami juga mencatat jam kerja hilang yang besar di Sumatera Utara I terkait dengan *fatality* yang terjadi di area tersebut.

Mencermati hal ini, kami berupaya untuk memperbaiki kinerja K3 kami pada masa yang akan datang. Kepatuhan dan kedisiplinan serta kepedulian karyawan akan K3 akan terus ditingkatkan. Program sosialisasi K3 terhadap karyawan, mitra dan pemasok akan dilakukan lebih intensif lagi di seluruh wilayah operasional kami.

Tabel yang berisi data hari dan jam kerja yang hilang akibat insiden kecelakaan berdasarkan wilayah perkebunan pada 2015 dan 2016 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel Jumlah Hari dan Jam Kerja Hilang Akibat Insiden Kecelakaan Kerja Berdasarkan Wilayah Perkebunan per 31 Desember 2015 dan 2016 [G4-LA6]

Lokasi Perkebunan	2016				2015			
	Hari Kerja Hilang		Jam Kerja Hilang		Hari Kerja Hilang		Jam Kerja Hilang	
	Hari	Persentase	Jam	Persentase	Hari	Persentase	Jam	Persentase
Sumatera Utara I	19	35,85%	133	35,85%	6	37,50%	42	37,50%
Sumatera Utara II	32	60,38%	224	60,38%	3	18,75%	21	18,75%
Belitung	2	3,77%	14	3,77%	3	18,75%	21	18,75%
Kalimantan Barat	0	0,00%	0	0,00%	4	25,00%	28	25,00%
Total	53	100,00%	371	100,00%	16	100,00%	112	100,00%

Catatan:

Kecelakaan yang menyebabkan hari kerja hilang dihitung ketika di hari berikutnya (1X24 jam) karyawan tidak masuk kerja karena rekomendasi dokter.

MEMPERKUAT KEMITRAAN [G4-DMA Local Communities]



Tim Koperasi Laman Mayang Sentosa (Dokumentasi ANJ)

Masyarakat lokal menjadi aspek yang material bagi kami di dalam laporan ini karena keberadaan wilayah perkebunan kami yang berada di tengah-tengah masyarakat lokal.

Kami juga menyadari bahwa keberlanjutan usaha kami tergantung pada dukungan sosial (*social license*) masyarakat lokal terhadap perusahaan kami yang berlokasi di Pulau Sumatera, Belitung, Kalimantan dan Papua. Oleh sebab itu, kami ingin meningkatkan modal sosial (*social capital*) dengan tumbuh dan sejahtera bersama masyarakat.

Sejalan dengan komitmen untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan setara, perusahaan kami melakukan beberapa pendekatan terhadap masyarakat lokal yang berada di sekitar wilayah perkebunan. Selain kesempatan menjadi karyawan Perusahaan, kami juga mendorong masyarakat untuk bermitra melalui pola inti-plasma manajemen satu atap (*single management*). Pendekatan lainnya yang kami lakukan yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat.

Saat ini kami sedang mengembangkan pola kemitraan inti-plasma manajemen satu atap di wilayah Belitung dan Kalimantan Barat. Dengan pola ini, kami melaksanakan semua kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun atas

nama koperasi. Petani tidak melakukan praktik budi daya kelapa sawit secara langsung dan transaksi penjualan TBS kami lakukan melalui koperasi.

Melalui skema ini, perhitungan jual beli TBS dilakukan berdasarkan luasan wilayah kebun mitra dan hasil penjualan dibayarkan oleh koperasi kepada petani. Dengan demikian, TBS dibeli dengan harga pasti. Model ini akan dikembangkan juga di wilayah perkebunan lain di Sumatera Utara I dan II, Sumatera Selatan dan Papua Barat.

Dasar regulasi kemitraan ini adalah Peraturan Menteri Pertanian No. 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, khususnya mengenai kewajiban pembangunan kebun bagi masyarakat minimal 20% dari total luas wilayah perkebunan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam skema kemitraan yaitu pengendalian risiko sengketa lahan. Untuk itu, kami memastikan kebun mitra memiliki surat-surat tanah yang sah untuk mencegah terjadinya risiko konflik lahan di kemudian hari.

Berikut ini tabel yang menyajikan data jumlah petani, luas kebun mitra dan TBS yang dihasilkan dari kebun mitra pada 2016.

Tabel Jumlah Petani, Luas Kebun dan Hasil Tandan Buah Segar pada Skema Inti-Plasma Manajemen Satu Atap di Belitung dan Kalimantan Barat per 31 Desember 2016

Wilayah Perkebunan	Luas Total Perkebunan (ha)	Luas Kebun Mitra		Jumlah Petani	Total Produksi TBS (Ton)	Produksi TBS Kebun Mitra	
		ha	%			Ton	%
Kalimantan Barat	12.940,81	2.020,45	15,61%	2.792	100.054,00	20.466,00	20,50%
Belitung*	16.276,84	860,00	5,28%	514	221.385,00	568,00	0,30%
Total	29.217,65	2.880,45	9,86%	3.306	321.439,00	21.034,00	6,50%

Catatan:

*Kemitraan di Kebun Belitung merupakan inisiatif masyarakat dan Perusahaan sebagai bagian dari pengembangan masyarakat. Kemitraan ini bukan dalam rangka memenuhi kewajiban regulasi pemerintah tentang kemitraan plasma karena kebun kami di Belitung sudah terbangun sebelum berlakunya regulasi tersebut.

MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT



Workshop Sekolah Adiwiyata di Belitung (Dokumentasi ANJ)

Kami memberdayakan masyarakat secara strategis dengan berlandaskan pada dua pendekatan. Pertama, perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengacu pada pemetaan sosial dan kajian dampak sosial atau *social economic and environmental impact assessment* (SEIA) secara bertahap di seluruh wilayah perkebunan. SEIA yang dilakukan pada 2016 mencakup wilayah pengembangan di Sumatera Selatan. SEIA wilayah Sumatera Utara I dan II, Belitung dan Kalimantan Barat telah dilakukan pada 2014. Sedangkan untuk wilayah pengembangan Papua Barat dilakukan sejak 2013. [G4-SO1]

Pendekatan kedua adalah pelibatan masyarakat lokal, tokoh setempat dan pemangku kepentingan terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat. Kami telah dan terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang kami lakukan di berbagai wilayah perkebunan kami.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat berada di bawah kendali Departemen CID dengan lima bidang kegiatan.

Pada bidang kesehatan dan pendidikan, kami menginisiasi program akses terhadap air bersih, pendidikan anak usia dini (PAUD), peningkatan kapasitas sekolah dasar hingga menengah atas dan dukungan bagi Sekolah Adiwiyata. Untuk bidang ekonomi, kami menekankan pada pelatihan vokasi (*vocational training*) dan pengembangan ekonomi pada rantai nilai (*value chain*). Kami bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya

dalam menentukan dan menjalankan berbagai program sosial, budaya dan agama serta infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat.

PPLH: Menuju Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten

Salah satu program kami untuk memberdayakan masyarakat di bidang pendidikan ialah dukungan terhadap penerapan konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Program ini dijalankan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (SMPN 1) Dendang, Belitung, yang telah menetapkan diri menjadi sekolah berbasis lingkungan. Melalui PPLH, SMPN 1 Dendang mendorong siswa untuk peduli terhadap lingkungan misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan dan membersihkan pekarangan rumah.

Siswa juga dididik untuk menghemat fasilitas dan sumber daya sekolah serta mendaur ulang kertas yang tidak terpakai dan sampah menjadi kerajinan tangan. Saat ini siswa telah memiliki keahlian untuk membuat bungkus kemasan plastik menjadi dompet, gelas plastik minuman menjadi keranjang, kain perca menjadi keset kaki, daun-daunan menjadi lukisan, kertas bekas menjadi lampion, tempat rokok dan bekas odol menjadi gantungan kunci.

Dampak dari PPLH dirasakan juga oleh orang tua siswa dan lingkungan tempat tinggal mereka. Siswa menularkan kepedulian terhadap lingkungan hidup pada orang tua di rumah. Upaya menerapkan PPLH menjadi bekal bagi SMPN 1 Dendang yang berupaya menjadi Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten.

Yayasan Perguruan ANJA: Mewadahi Kebutuhan Pendidikan Anak

Berawal dari kebutuhan pendidikan anak-anak pekerja di wilayah perkebunan, perusahaan kami melalui Yayasan Perguruan Austindo Nusantara Jaya Agri (Yayasan Perguruan ANJA) menyediakan fasilitas sekolah di wilayah perkebunan Sumatera Utara I dan II di Binanga dan Siais. Sekolah yang disediakan mengusung program pendidikan wajib belajar 12 tahun, terdiri dari PAUD, TK, SD dan SMP. Khusus untuk SMA, saat ini belum dapat dibentuk.

Di Desa Simangambat, Binanga, SD Eka Pendawa Sakti dan SMP Eka Pendawa Sakti yang kami bina memiliki akreditasi A, sedangkan TK Harapan Bangsa belum terakreditasi. Adapun di Desa Pardomuan, Siais, TK Eka Pendawa Sakti belum terakreditasi dan SD Eka Pendawa Sakti masih dalam proses persiapan akreditasi.

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan data Yayasan Perguruan ANJA berdasarkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN/NIS) dan akreditasinya per akhir Desember 2016.

Tabel Yayasan Perguruan ANJA Berdasarkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN/NIS) dan Akreditasi per 31 Desember 2016

Lokasi	Tingkatan	Nama Sekolah	NPSN/NIS (Nomor Pokok Sekolah Nasional)	AKREDITASI
ANJA	TK	Harapan Bangsa	NPSN 69950958	Belum Terakreditasi
Desa Simangambat	SD	Eka Pendawa Sakti	NPSN 10207096	Akreditasi A
	SMP	Eka Pendawa Sakti	NPSN 10220930	Akreditasi A
ANJAS	TK	Eka Pendawa Sakti	NPSN 69872452	Belum Terakreditasi
Desa Pardomuan	SD	Eka Pendawa Sakti	NPSN 69856883	Dalam Proses persiapan Akreditasi

Saat ini tercatat ada lebih dari seribu siswa yang dilayani oleh Yayasan Perguruan ANJA. Di masa depan, jumlah sekolah akan ditambah dan dibangun di wilayah perkebunan lainnya di mana ketersediaan sekolah di lingkungan lokal belum memadai, termasuk di Sumatera Selatan dan Papua Barat yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Kami juga akan terus mengembangkan kemampuan akademik dan prestasi siswa dan guru Yayasan Perguruan ANJA untuk meningkatkan daya saing di dunia pendidikan.

Sekolah Yayasan Perguruan ANJA juga telah menorehkan beberapa prestasi melalui siswa dan siswi didiknya. Prestasi yang dicapai antara lain Juara III Bulu Tangkis SMP beregu putra dan putri serta Juara III Bulu Tangkis SD beregu putra tingkat kabupaten pada Desember 2016. Selain itu, sederet prestasi juara lain di tingkat kecamatan juga dicapai, antara lain juara bulu tangkis, lari estafet, tenis meja, catur, azan, tolak peluru, lempar cakram dan lompat jauh.



KA Zuharman MZ

Petani Mitra di PT Sahabat Mewah dan Makmur (SMM)

Pada 2009, kami sebagai kelompok tani mulai menanam dengan benih yang didapat dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). Meski modal kami terbatas, kami tetap semangat dan bekerja keras hingga pada 2013 untuk pertama kalinya dapat menjual buah sawit ke SMM.

Sebelum ada panen, penghasilan kami tidak menentu. Setelah SMM membeli TBS dari masyarakat, kami memiliki penghasilan dan menjadi lebih bersemangat mengembangkan usaha perkebunan kami. Dari penjualan hasil kebun, saya juga bisa mengembangkan usaha lainnya seperti toko barang kelontong dan sembako.

Tantangan saat ini yaitu berkurangnya lahan subur di kampung. Upaya penyuburan kami lakukan melalui pemupukan dengan tandan buah kosong. Harapan kami, penjualan buah sawit ke pabrik SMM di masa depan dapat lebih baik lagi.



Erlina Pane

Guru SMPN 1 Simangambat, Binanga

Kami berterima kasih atas peran ANJ memberi kesempatan kepada kami mengikuti program pelatihan dan pengembangan kapasitas guru yang dijalankan pada 2016. Program ini memiliki tiga tahap yang disebut *on going 1*, *on going 2* dan *on going 3*.

Di dalam program, seluruh guru peserta pelatihan mengunjungi sekolah-sekolah sasaran program secara bergantian untuk mengamati metode pembelajaran yang diterapkan oleh para guru peserta pelatihan di kelas masing-masing. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, dilanjutkan dengan kegiatan refleksi, yaitu guru yang mengajar mendapat masukan dari rekan-rekan guru yang mengamati.

Pengamatan merupakan metode pembelajaran efektif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Para guru dapat melihat hal yang baik dari sesama rekan guru dan menerapkannya di sekolah masing-masing, misalnya dalam hal penggunaan alat bantu sederhana yang mudah dipahami siswa.



MENINGKATKAN KINERJA

3



MEKANISME LACAK BALIK



Pemuatan TBS di ANJAS (Dokumentasi ANJ)

Penerapan mekanisme lacak balik (*traceability*) merupakan isu yang material dalam sektor industri kelapa sawit karena para pembeli dan pemangku kepentingan ingin mengetahui jika CPO dan PK diolah dari TBS yang berasal dari praktik perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Bagi kami, mekanisme lacak balik merupakan hal yang kritical karena pabrik pengolahan kelapa sawit kami juga menerima pasokan dari lahan perkebunan lain, yaitu dari wilayah perkebunan inti-plasma dan perkebunan lain milik perusahaan atau badan usaha yang independen.

Melalui mekanisme lacak balik, kami mendokumentasikan asal-usul CPO, PK dan TBS dan memastikan bahwa:

- TBS yang diperoleh bukan berasal dari tanaman yang berada pada lahan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi (*non high conservation value* atau non-HCV);
- pengolahan CPO dan PK serta perkebunan asal TBS dikelola dengan cara yang baik, tidak melanggar HAM, tidak melanggar hukum, tidak menyebabkan konflik lahan berkepanjangan serta memperhatikan kesejahteraan karyawan dan masyarakat lokal.

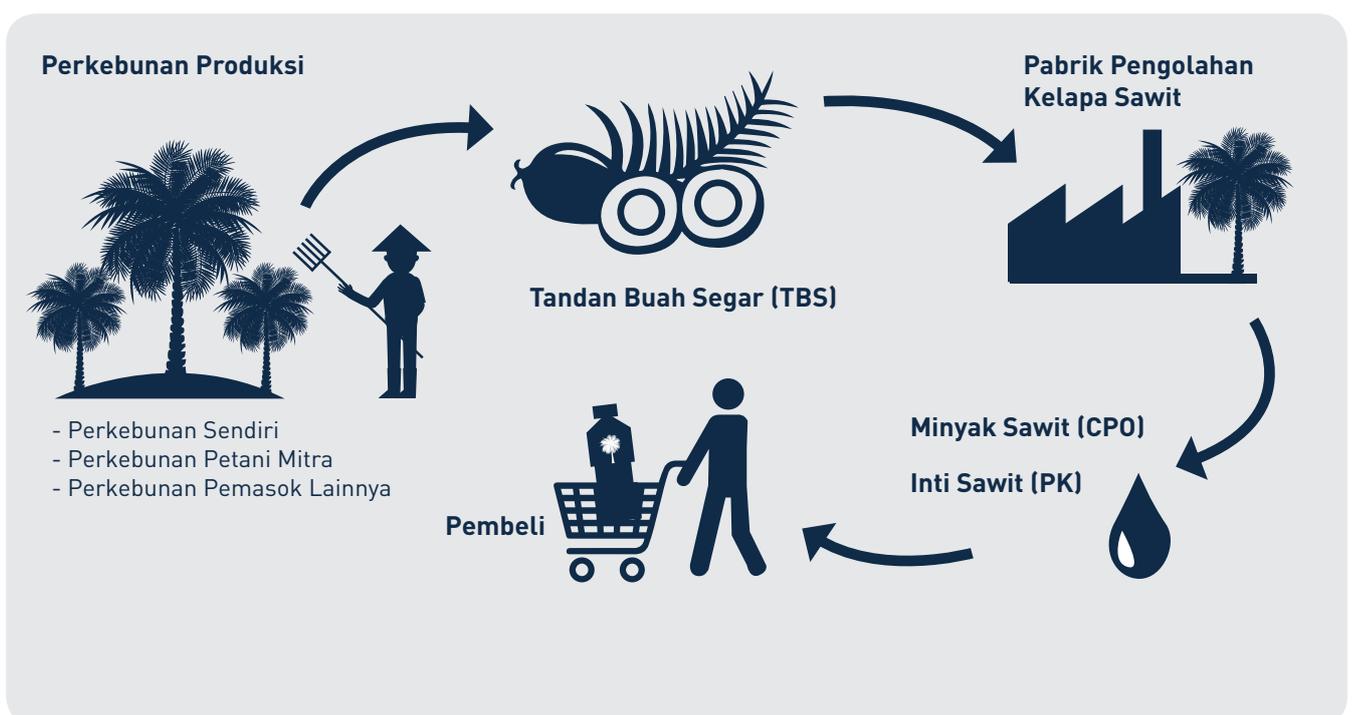
Di ANJAS, kami bekerja sama dengan Conservation International-Indonesia (CI) dalam pengambilan data lokasi kebun masyarakat untuk kebutuhan lacak balik. Pengambilan data tersebut kami lakukan juga dalam rangka mengamati kondisi terkini perkebunan serta menyosialisasikan ISPO kepada masyarakat di sekitar Perusahaan.

Pemetaan telah dilakukan pada Maret 2016 dan kemudian dilanjutkan sosialisasi pada 24 Agustus 2016. Bertemakan “Sosialisasi Traceability Sumber TBS PT ANJ Agri Siais”, kegiatan tersebut dihadiri oleh instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan perwakilan Kementerian Pertanian. Pada kesempatan tersebut, Kementerian Pertanian menyampaikan materi terkait ISPO.

Dokumentasi atas mekanisme lacak balik dilakukan dan dipantau oleh Divisi *Supply Chain Management* (SCM) dan Divisi Komersial serta dilaporkan kepada Direktur SCM.

Rantai Pasokan Kelapa Sawit [G4-12]

Sampai dengan akhir 2016, kami mencatat sejumlah pihak yang terlibat dalam rantai pasokan kami. Terdapat total 2 perseroan terbatas, 4 kelompok non-mitra, 8 badan usaha dan 2 perkebunan milik perseorangan yang menjadi pemasok kami di wilayah perkebunan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II dan Belitung.



Ada 3 koperasi plasma di wilayah perkebunan Kalimantan Barat dan 7 koperasi mitra mandiri dan 1 BUMDES di Belitung yang menjual TBS ke perusahaan kami. Tabel berikut berisi data jumlah pemasok TBS berdasarkan jenis pemasok dan wilayah perkebunan.

Tabel Jumlah Pemasok TBS Berdasarkan Jenis Pemasok dan Wilayah Perkebunan per 31 Desember 2016 [G4-12]

No.	Wilayah Perkebunan	Koperasi Mitra dan BUMDES	Perseroan Terbatas (PT)	Koperasi / Kelompok Non Plasma	Badan Usaha (UD/CV)	Usaha Perseorangan
1	Sumatera Utara I	0	0	0	4	1
2	Sumatera Utara II	0	0	1	2	1
3	Belitung	8*	2	3	2	0
4	Kalimantan Barat	3**	0	0	0	0

Catatan:

*) Ada 7 koperasi mitra dan 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

***) Koperasi mitra

Ada 3 koperasi plasma di wilayah perkebunan Kalimantan Barat dan 7 koperasi mitra mandiri dan 1 BUMDES di Belitung yang menjual TBS ke perusahaan kami. Tabel di atas berisi data jumlah pemasok TBS berdasarkan jenis pemasok dan wilayah perkebunan.

Keterlibatan berbagai pihak dalam jalur pasokan kami menunjukkan komitmen kami untuk memberi dampak ekonomi secara positif bagi para pemangku kepentingan, termasuk juga masyarakat lokal. Namun di sisi lain, kami perlu memastikan para pihak turut mengelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan RSPO dan ISPO yang mensyaratkan penerapan metode lacak balik terhadap jalur pasokan.



Pemuatan CPO (Dokumentasi ANJ)

KINERJA PRODUKSI DAN EKONOMI

[G4-DMA Economic Performance]



Kunjungan Direktur Utama ke ANJA (Dokumentasi ANJ)

Sebagai perusahaan terbuka, kinerja produksi dan ekonomi menjadi aspek penilaian yang penting oleh para investor dan pemangku kepentingan lainnya. Pertumbuhan produksi, profitabilitas dan indikator keuangan lainnya menjadi landasan analisis untuk melihat kemampuan kami mempertahankan kelangsungan hidup Perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, kami menyampaikan kinerja produksi dan ekonomi kami di dalam laporan ini.

Kinerja produksi kami dapat ditinjau dari hasil panen TBS dan hasil pengolahan CPO dan PK. Penyajian kinerja ekonomi pada laporan ini mengacu pada GRI G4 *Sustainability Reporting Guidelines*.

Kami menyadari laporan ini belum dapat menyampaikan data kinerja ekonomi secara utuh karena perbedaan metode penyajian data antara laporan keuangan konsolidasian yang berbasis pada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) dan laporan keberlanjutan yang berbasis pada nilai ekonomi yang diperoleh dan terdistribusi (*economic value generated and distributed* atau EVG&D).

Produksi TBS

Total produksi TBS kami pada 2016 mencapai 841.281 ton, dengan 18,64% atau 156.848 ton dari total tersebut berasal dari pemasok lain yang independen. Kami juga mendapatkan pasokan TBS dari petani inti-plasma sebanyak 21.034 ton pada tahun tersebut.

Secara umum, produksi pada 2016 sedikit menurun, mencapai 94% dari produksi tahun sebelumnya. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja produksi di wilayah perkebunan kami, antara lain karena faktor cuaca yang kurang mendukung.

Tabel berikut menyajikan data produksi TBS berdasarkan wilayah perkebunan dan asalnya untuk periode 2015 dan 2016.

Tabel Produksi Tandan Buah Segar (TBS) Berdasarkan Wilayah Perkebunan dan Asalnya per 31 Desember 2015 dan 2016

Asal TBS	2016		2015	
	Produksi (Ton)	%	Produksi (Ton)	%
Wilayah Perkebunan Sumatera Utara I				
Perkebunan sendiri	207.293,00	75,68%	233.512,00	84,50%
Perkebunan pemasok lain	66.601,00	24,32%	42.841,00	15,50%
Jumlah	273.894,00	100,00%	276.353,00	100,00%
Wilayah Perkebunan Sumatera Utara II				
Perkebunan sendiri	185.739,00	75,52%	189.615,00	74,67%
Perkebunan pemasok lain	60.209,00	24,48%	64.333,00	25,33%
Jumlah	245.948,00	100,00%	253.948,00	100,00%
Wilayah Perkebunan Belitung				
Perkebunan sendiri	190.779,00	86,18%	291.052,00	94,41%
Perkebunan mitra	568,00	0,26%	117,00	0,04%
Perkebunan pemasok lain	30.038,00	13,57%	17.101,00	5,55%
Jumlah	221.385,00	100,00%	308.270,00	100,00%
Wilayah Perkebunan Kalimantan Barat				
Perkebunan sendiri	79.588,00	79,55%	42.495,00	78,27%
Perkebunan mitra	20.466,00	20,45%	11.798,00	0,00%
Jumlah	100.054,00	100,00%	54.293,00	78,27%
Rekapitulasi Produksi Tandan Buah Segar				
Perkebunan sendiri	663.399,00	78,86%	756.674,00	84,75%
Perkebunan mitra	21.034,00	2,50%	11.915,00	1,33%
Perkebunan pemasok lain	156.848,00	18,64%	124.275,00	13,92%
Jumlah	841.281,00	100,00%	892.864,00	100,00%

Produksi Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit

Pabrik pengolahan kelapa sawit kami pada 2016 menghasilkan minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (PK) sebanyak 177.273 ton dan 38.284 ton. Wilayah perkebunan Sumatera Utara I dan II mencatat hasil produksi CPO dan PK terbesar dibandingkan wilayah perkebunan kami yang lain. Jika dibandingkan produksi tahun sebelumnya, produksi CPO dan PK menurun sekitar 8,1% dan 13,4%. Hal ini sejalan dengan menurunnya jumlah TBS yang diterima oleh pabrik pengolahan kelapa sawit kami.

Data produksi CPO dan PK dalam dua tahun terakhir berdasarkan wilayah perkebunan, kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel Hasil Produksi Minyak Kelapa Sawit (CPO) dan Inti sawit (PK) Berdasarkan Wilayah Perkebunan per 31 Desember 2015 dan 2016

Jenis Produksi	2016		2015	
	Produksi (Ton)	%	Produksi (Ton)	%
Wilayah Perkebunan Sumatera Utara I				
Minyak kelapa sawit (CPO)	57.196,00	80,18%	58.798,00	80,95%
Minyak inti sawit (PK)	14.132,00	19,82%	13.839,00	19,05%
Jumlah	71.328,00	100,00%	72.637,00	100,00%
Wilayah Perkebunan Sumatera Utara II				
Minyak kelapa sawit (CPO)	53.751,00	82,56%	55.465,00	82,91%
Minyak inti sawit (PK)	11.353,00	17,44%	11.423,00	17,09%
Jumlah	65.104,00	100,00%	66.888,00	100,00%
Wilayah Perkebunan Belitung				
Minyak kelapa sawit (CPO)	45.947,00	81,69%	67.278,00	79,33%
Minyak inti sawit (PK)	10.301,00	18,31%	17.527,00	20,67%
Jumlah	56.248,00	100,00%	84.805,00	100,00%
Wilayah Perkebunan Kalimantan Barat				
Minyak kelapa sawit (CPO)	20.379,00	89,08%	11.350,00	88,92%
Minyak inti sawit (PK)	2.498,00	10,92%	1.415,00	11,08%
Jumlah	22.877,00	100,00%	12.765,00	100,00%
Rekapitulasi Produksi CPO dan PK				
Minyak kelapa sawit (CPO)	177.273,00	82,24%	192.891,00	81,35%
Minyak inti sawit (PK)	38.284,00	17,76%	44.204,00	18,65%
Jumlah	215.557,00	100,00%	237.095,00	100,00%

**Nilai Ekonomi
yang Diperoleh,
Didistribusikan dan
Ditahan
[G4-EC1] [G4-EC4]**

Nilai ekonomi yang kami sajikan dalam Laporan ini merupakan arus kas keluar dan arus kas masuk yang mencerminkan manfaat finansial bagi perusahaan kami dan pemangku kepentingan terkait. Nilai ekonomi yang kami peroleh merupakan arus kas masuk yaitu manfaat finansial yang masuk ke perusahaan kami, yang dapat berasal dari pendapatan operasional, investasi masuk, pinjaman maupun dari penjualan aset. Sebaliknya, nilai ekonomi yang kami distribusikan merupakan arus kas keluar yaitu manfaat finansial yang antara lain ditujukan untuk pemasok dan karyawan, pelunasan pinjaman, pajak bagi pemerintah, pemberdayaan masyarakat maupun untuk pembelian aset.

Sepanjang 2016, kami memperoleh nilai ekonomi sebesar USD260.156.136. Nilai tersebut sebagian besar berasal dari kegiatan operasional, yaitu USD133.093.192, dan sumber lainnya seperti pendanaan jangka pendek sebesar USD64.447.359 dan pendanaan jangka panjang sebesar USD49.140.932. Kami tidak memperoleh manfaat ekonomi dari bantuan finansial pemerintah dalam bentuk fasilitas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, subsidi, hibah, kredit ekspor atau insentif lain. Pada 2016, KAL menggunakan fasilitas bebas bea masuk untuk impor barang modal sesuai peraturan penanaman modal. Fasilitas ini juga disediakan bagi perusahaan lain yang terdaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Nilai ekonomi yang kami distribusikan pada 2016 mencapai USD262.378.169. Sebagian besar nilai ekonomi tersebut digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan karyawan, masing-masing sebesar USD54.283.403 dan USD29.034.974 serta untuk pelunasan pinjaman jangka pendek yang jatuh tempo sebesar USD83.555.480. Kontribusi ekonomi kami juga disalurkan melalui pembayaran pajak penghasilan kepada negara sebesar USD14.230.349 pada tahun yang sama.

Nilai ekonomi yang kami peroleh dan distribusikan pada 2016 secara umum lebih rendah dari perolehan dan pendistribusian nilai ekonomi tahun sebelumnya. Nilai ekonomi yang ditahan pada 2016 negatif USD2.222.033, mencerminkan penurunan saldo kas dan setara kas kami selama 2016. Nilai ekonomi negatif pada 2016 terjadi sejalan dengan pembiayaan kami terhadap investasi pembangunan pabrik minyak kelapa sawit di Kalimantan Barat serta investasi pengembangan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan pabrik pengolahan tepung sagu di Papua Barat.

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan data nilai ekonomi yang diperoleh, didistribusikan dan ditahan per 31 Desember untuk periode 2015 dan 2016.

Tabel Nilai Ekonomi yang Diperoleh, Didistribusikan dan Ditahan per 31 Desember 2015 dan 2016

Uraian	Satuan	2015	2016
Nilai ekonomi yang diperoleh		260.156.136	317.920.934
Nilai ekonomi yang didistribusikan	USD	262.378.169	328.950.915
Nilai ekonomi yang ditahan		-2.222.033	-11.029.981

Catatan: Data diolah dari Laporan Arus Konsolidasian yang Telah Diaudit Tahun 2016



Florensus Gondon

Mantan Kepala Dusun Manjau, Desa Laman Satong dan karyawan KAL yang berperan sebagai Humas Desa

Saat awal saya ke Manjau, area di KAL masih hutan. Namun, begitu KAL masuk, rumah sekarang sudah bagus dan jalan sudah terbuka.

Kehadiran KAL membawa perubahan yang cukup signifikan bagi masyarakat Desa Laman Satong, yaitu dengan berdirinya Koperasi Laman Mayang Sentosa yang mewadahi skema kerja sama ANJ dengan petani inti-plasma. Saat ini masyarakat mendapatkan dana talangan terlebih dahulu karena perhitungan hasil kebun belum ada. Saya menilai kerja sama ini berdampak positif bagi masyarakat.

Namun saya pun memiliki kekhawatiran tentang pengelolaan keuangan oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat belum terbiasa menerima dana dalam jumlah besar. Jika tidak dikelola dengan baik, hal itu akan menjadi bumerang bagi pemerintah desa maupun perusahaan.



Simon Badcock

Senior Terrestrial Program Advisor, Conservation International

Conservation International-Indonesia, melalui *Sustainable Landscape Program*, telah bekerja sama dan bermitra dengan sejumlah sektor swasta, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit, dengan tujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berdasarkan perbaikan di bidang perkebunan dan konservasi sumber daya hutan yang penting.

Selama tiga tahun terakhir, kami telah bekerja sama dengan ANJ di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, untuk meningkatkan kinerja operasi mereka dan melibatkan perusahaan lain serta para petani dalam meningkatkan upaya keberlanjutan. Di wilayah operasinya di Tapanuli Selatan, ANJ menyelesaikan dan memperoleh sertifikat ISPO yang merupakan persyaratan wajib dari Pemerintah Indonesia. ANJ sebelumnya telah menjadi anggota RSPO.

ANJ adalah anggota aktif dari forum lintas pemangku kepentingan yang dibentuk oleh CI melalui *Sustainable Landscape Partnership* untuk membahas isu-isu keberlanjutan, yaitu Sekretariat Bersama untuk Kelapa Sawit Lestari. Forum tersebut dipimpin oleh Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara, yang pesertanya juga mencakup sejumlah forum pemangku kepentingan di tingkat kecamatan.

Melalui MoU dengan ANJ, CI terus bekerja sama mendalami bagaimana Perjanjian Konservasi Masyarakat dapat mendukung upaya mengurangi deforestasi yang disebabkan oleh produksi petani mandiri, tidak hanya di Tapanuli Selatan namun juga kemungkinannya di wilayah yang lebih luas di Sumatera Utara.

CI mendorong ANJ untuk menanamkan dan menduplikasi prinsip-prinsip keberlanjutan dan konservasi di seluruh operasinya di Indonesia.

EMAS HIJAU DI BUMI CENDRAWASIH



Penyiraman bibit sawit di pagi hari (Dokumentasi ANJ)

Mengambil keputusan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat, Pulau Papua, yang terkenal dengan nama “Bumi Cenderawasih”, bukanlah hal yang mudah. Kami melihat Papua Barat membutuhkan pembangunan dan permasalahan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan masyarakat serta ketersediaan infrastruktur masih menjadi isu yang signifikan di wilayah tersebut. Masuknya perusahaan kami ke wilayah Papua Barat diyakini dapat berdampak positif bagi sosial ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, Papua Barat memiliki wilayah hutan yang luas dan kaya akan keanekaragaman hayati. Hutan juga masih menjadi sumber kehidupan utama masyarakat setempat. Isu kelestarian lingkungan dan penghargaan terhadap masyarakat adat menjadi tantangan besar kami dalam mengelola perkebunan di Papua Barat.

ANJ memiliki tujuan untuk membangun dan mengimplementasikan pendekatan “Sawit untuk Kesejahteraan”, yaitu pendekatan yang memanfaatkan potensi sagu dan sawit untuk menggerakkan pembangunan roda ekonomi di wilayah setempat. Hal ini sejalan dengan pengelolaan lingkungan secara seksama, sebagai bagian dari bentang alam hutan yang lebih luas di sekitar wilayah perkebunan.

Dilandasi keinginan untuk menggali potensi yang ada di Papua Barat dan turut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan penduduk setempat, kami mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat, Papua Barat, bersama dua anak perusahaan kami, PT

Putera Manunggal Perkasa (PMP) dan PT Permata Putera Mandiri (PPM). Hingga akhir 2016, kami telah menyiapkan area pembibitan seluas 80 ha yang dikelola oleh PMP untuk memenuhi kebutuhan perkebunan inti dan plasma.

Pengelolaan Lahan Berkelanjutan

Visi kami di Papua Barat sangat jelas, bahwa kami menanamkan investasi untuk tujuan jangka panjang yang berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian alam secara berimbang. Terkait hal tersebut, kami sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan pengelolaan lahan di wilayah Papua Barat yang memiliki kekayaan alam dan kawasan hutan yang lebat.

Sejak 2015, kami telah menghentikan sementara kegiatan pengembangan lahan dan menugaskan tim untuk mengevaluasi kembali luasan kawasan HCV. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada wilayah lahan gambut yang terkena dampak operasi kami.

Perusahaan telah menunjuk konsultan internasional yang bereputasi tinggi untuk melaksanakan studi ekologi. Sejauh ini hasil evaluasi menunjukkan bahwa lahan gambut, lahan basah dan area dengan tanah marjinal telah dicadangkan sebagai area konservasi.

Sebagai anggota RSPO, kami melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) di area PMP dan PPM dengan melibatkan assesor RSPO yang tersertifikasi sebagai pengawas. Selain itu, kami juga memastikan area konsesi sudah berstatus area penggunaan lain (APL) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Status Konsesi Lahan Perkebunan di Papua Barat*

Perusahaan dan Anak Perusahaan Pengelola	Wilayah	Surat Keputusan Menteri Kehutanan	Masa Konsesi
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ)	Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat	Nomor SK.84/Menhut-II/2014, tanggal 22 Januari 2014	35 tahun
PT Putera Manunggal Perkasa (PMP)	Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat	Nomor SK.84/Menhut-II/2014, tanggal 22 Januari 2014 Nomor SK.606/Menhut-II/2012, tanggal 31 Oktober 2012	35 tahun
PT Permata Putera Mandiri (PPM)	Kabupaten Sorong Selatan	Nomor SK.731/Menhut-II/2011, tanggal 21 Desember 2011	30 tahun

Catatan:

- *) Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Konservasi Air dan Hutan Provinsi Papua Barat, telah menetapkan lahan perkebunan PMP, PPM dan PT Pusaka Agro Makmur (kini ANJ) tidak lagi termasuk kategori hutan lindung.

Mengutamakan Dialog dan Konsensus Bersama

Kami menyadari bahwa pengembangan lahan di Papua Barat harus dilakukan sesuai dengan persetujuan masyarakat, pemerintah dan kebutuhan pembangunan. Lebih dari itu, pengembangan perkebunan juga perlu memperhatikan konservasi alam secara berkelanjutan. Sesuai dengan komitmen kami terhadap aspek keberlanjutan, pengembangan usaha kami di Papua Barat akan mengutamakan dialog dengan para pemangku kepentingan terkait berlandaskan prinsip *free, prior informed consent* (FPIC) atau KBDD.

Kami telah menerapkan prinsip KBDD di PPM dan PMP, masing-masing sejak 2011 dan 2013. Penerapan prinsip tersebut kami dokumentasikan sejak sebelum pelepasan hak ulayat. Sebagai bagian dari akuntabilitas kami, rincian isi dokumen pelepasan tersebut kami sosialisasikan sebelum diserahkan ke masyarakat.

Sesuai dengan Prosedur Penanaman Baru yang diatur oleh Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO), pada 2016 kami mengadakan dialog melalui konsultasi publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Mratuwa Sesna, Teminabuan, Sorong Selatan pada 1 dan 2 Juni 2016. Tujuannya yaitu untuk membangun relasi dengan masyarakat, berdiskusi tentang peluang dan risiko pada industri kelapa sawit dan menyajikan informasi kajian Dampak Lingkungan dan NKT yang dilaksanakan oleh Malaysian Environmental Consultants.

Konsultasi publik dihadiri oleh 200 orang perwakilan suku di Maybrat (dari Kampung Ikana, Mukamat, Womba, Srumate dan Benawa I), perwakilan musyawarah pimpinan daerah (Muspida), perwakilan Pemerintah Kabupaten Maybrat dan Sorong Selatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta media. Acara tersebut merupakan kesempatan baik bagi Perusahaan untuk menyampaikan komitmen kami terhadap keseimbangan usaha, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi Papua Barat.

Selain mengadakan konsultasi publik, kami telah menugaskan sekitar 40 orang staf kami untuk mengelola inisiatif tanggung jawab sosial kami di Papua Barat. Kami juga menyelenggarakan Forum Aspirasi Kampung untuk memetakan kebutuhan desa dan menjalin komunikasi dengan masyarakat lokal.

Menangani Keluhan, Menyelesaikan Perselisihan

Untuk menangani pengaduan dan keluhan masyarakat, saat ini kami melakukan analisa risiko sosial yang mencakup tiga komponen penting, yaitu pemetaan pemangku kepentingan, pemetaan risiko dan pemantauan terhadap keluhan pemangku kepentingan. Ketiga komponen tersebut menjadi alat ukur bagi kami untuk menilai kinerja sosial dan memantau isu-isu yang dapat mempengaruhi kelancaran operasi Perusahaan.

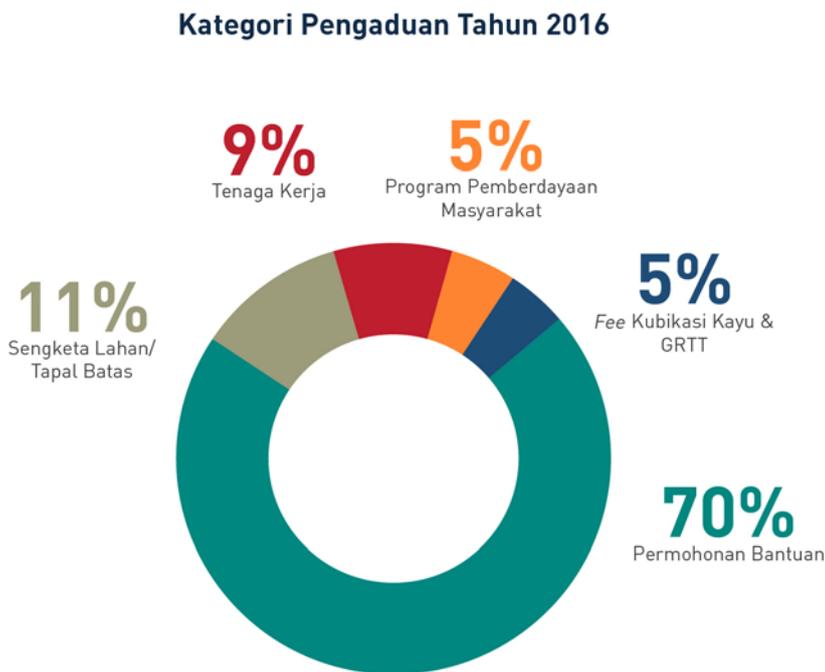
Sejauh ini kami juga terus memperbaiki SOP dan peraturan untuk menangani berbagai permintaan dan pengaduan. Penataan dan pengaplikasian SOP penanganan keluhan akan membantu petugas lapangan untuk mengambil

sikap pada keluhan yang masuk kepada Perusahaan dan jelas prosedur penanganannya.

Hingga akhir 2016, kami telah mengelompokkan pengaduan dan keluhan berdasarkan lima kategori. Jumlah pengaduan terbesar terkait permohonan bantuan yaitu 70%, sedangkan pengaduan lainnya terkait dengan sengketa lahan antar marga/tapal batas antar marga (11%), permintaan tenaga kerja (9%), program pemberdayaan masyarakat (5%) dan *fee* kubikasi kayu dan ganti rugi tanam tumbuh/GRTT (5%).

Diagram berikut ini menggambarkan persentase kategori pengaduan dan keluhan masyarakat yang kami terima sepanjang 2016.

Diagram Persentase Kategori Pengaduan dan Keluhan Masyarakat Tahun 2016



Selain pengaduan dan keluhan, kami juga menghadapi beberapa isu dan gugatan, antara lain terkait perselisihan tapal batas dan ganti rugi. Salah satu gugatan yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir yaitu dilakukan oleh Yakomina Gue terhadap perusahaan kami. Yakomina Gue yang menyatakan diri sebagai pewaris tunggal tanah milik Suku Iwaro di wilayah operasional PPM mendaftarkan gugatan dan klaim ganti rugi tanah pada Pengadilan Negeri Sorong pada 1 Oktober 2015. Pada 25 Juli 2016, pengadilan memutuskan bahwa berdasarkan bukti dokumen yang diajukan ke pengadilan, gugatan tersebut tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

Di wilayah perkebunan PMP dan PPM, kami masih menghadapi perselisihan sengketa tapal batas lahan antar suku dan ganti rugi lahan yang sebelumnya telah kami selesaikan berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat. Isu tapal batas merupakan salah satu isu sentral karena dapat menimbulkan ketegangan antar suku.

Penyelesaian sengketa tapal batas ini penting karena kami hanya dapat melakukan ganti rugi jika ada identifikasi tapal batas lahan yang jelas. Sejalan dengan prosedur FPIC atau KBDD yang disyaratkan RSPO, proses penyelesaian sengketa tapal batas lahan ini membutuhkan waktu untuk berdialog dengan kelompok suku, marga dan anggota keluarga di dalamnya bersama pemerintah setempat dan tokoh adat.

Memperhatikan Kepedulian Global Terhadap Lingkungan Hidup

Sebagai anggota RSPO, kami memperhatikan kepedulian global terhadap lingkungan hidup. Hal ini tercermin pada respon Perusahaan terhadap Greenpeace, yang merupakan organisasi aktivis lingkungan hidup yang memiliki jaringan internasional. Pada September 2016, Perusahaan diminta untuk memberikan informasi mengenai operasi di Papua Barat, sebagai bagian dari laporan investigasi yang disusun untuk Grup IOI, sebuah kelompok perusahaan kelapa sawit yang berkedudukan di Malaysia. Laporan investigasi tersebut menitikberatkan pada praktik-praktik yang dijalankan oleh pemasok pihak ketiga terhadap Grup IOI.

Kami telah menegaskan bahwa ANJ bukan merupakan pemasok pihak ketiga Grup IOI dan berupaya mematuhi regulasi serta ketentuan RSPO. Kami juga menyampaikan bahwa Perusahaan telah melaksanakan penilaian NKT kembali dan sementara waktu menetapkan moratorium pembukaan lahan atas inisiatif sendiri sesuai dengan persyaratan RSPO.

Dalam hal melakukan pendekatan dengan masyarakat, kami menyatakan penerapan FPIC atau KBDD merupakan landasan utama kami sebagai syarat pembebasan lahan dengan melibatkan masyarakat setempat. Kami telah mengambil pendekatan konsultatif dengan masyarakat setempat, yang pada umumnya menyambut baik pengembangan perkebunan kelapa sawit di area tersebut.

Sejalan dengan kepedulian kami terhadap pembangunan keberlanjutan, kami menghargai Greenpeace sebagai pemangku kepentingan kunci dalam pembahasan di tingkat nasional mengenai tanggung jawab industri kelapa sawit. Kami akan menyambut baik setiap interaksi konstruktif dengan Greenpeace maupun pemerhati lingkungan hidup lainnya di masa mendatang.

Informasi lebih lanjut mengenai tanggapan Perusahaan terhadap Greepeace dapat dilihat pada halaman 141-143, Laporan Tahunan 2016 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Membangun Ekonomi Rumah Tangga Melalui Pertanian

Kami melakukan pemberdayaan ekonomi di Papua Barat melalui sektor pertanian. Membangun budaya cocok tanam di Sorong Selatan bukanlah hal yang mudah karena masyarakat sudah terbiasa mengambil hasil alam langsung dari hutan. Di Puragi-Tawanggire, masyarakat mulai menanam sayur di sekitar rumah namun belum melakukan diversifikasi dan menggunakan pola budi daya pertanian. Kami bekerja sama dengan Yayasan Paramitra mendampingi masyarakat dalam hal bercocok tanam di Puragi-Tawanggire serta Saga pada 2016.

Setelah empat bulan berjalan, tanaman mulai menghasilkan. Bahkan panen saat ini dilakukan setiap dua minggu sekali yang hasilnya dijual ke Perusahaan dan masyarakat. Melihat pencapaian ini, mulai banyak masyarakat yang menanam sayur di pekarangan rumah masing-masing.

Selain keahlian bercocok tanam, masyarakat mendapatkan pelatihan dan pendampingan penjualan, pengetahuan berhitung dan keahlian pencatatan keuangan sederhana.

Kontribusi bagi Kesehatan Masyarakat

Di Papua Barat, kami melaksanakan survei kesehatan dasar di 27 desa bekerja sama dengan Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia (YPCII). Survei tersebut mengukur beberapa indikator kesehatan dasar, seperti kualitas air, kesehatan anggota masyarakat dan perilaku kebersihan serta pola pembuangan sampah rumah tangga.

Selain itu, kami menjalin kerja sama dengan petugas kesehatan pemerintah untuk melaksanakan pengobatan gratis untuk ibu dan anak. Pada 2016, kami juga menyelesaikan infrastruktur penyediaan air bersih di salah satu desa bekerja sama dengan Yayasan Anak Sehat Papua (YASP).

Pendidikan Tumbuh Kembang Anak Melalui PAUD dan Orang Tua

Pada sektor pendidikan, kami melihat bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) tidak terlepas dari konteks pendidikan tumbuh kembang anak oleh orang tua. Oleh sebab itu, kami bekerja sama dengan Yayasan Indonesia Lebih Baik (YILB) untuk melakukan sosialisasi perkembangan anak yang sejalan dengan dukungan kami terhadap PAUD.

Salah satu binaan kami, yaitu PAUD Ceria, berlokasi di Kampung Saga, Distrik Metemani, Kabupaten Sorong Selatan. Berlokasi di kantor kampung, PAUD Ceria memberikan pendidikan gratis bagi kelompok anak usia 2-3 tahun untuk Kelas Bermain, 4-5 tahun di Kelas *Playgroup* dan 6 tahun untuk Kelas TK A dan B. PAUD Ceria dikelola oleh Yuliana Tanopi, yang akrab dipanggil Bunda Lili, bersama beberapa rekan lainnya. Bantuan yang kami berikan berupa buku, alat peraga dan permainan bagi anak-anak turut mendorong semangat mereka untuk terus berkarya bagi anak-anak Kampung Saga.

Sejak Februari 2016, kami memiliki tim penggerak yang mulai berkunjung ke rumah-rumah orang tua secara rutin untuk berdiskusi mengenai

perkembangan anak mereka dan memberikan masukan dalam mendidik anak. Pada Maret 2016, sosialisasi dilakukan di Kampung Sumano, Benawa 1-Kauri, Saga dan Puragi-Tawanggire dengan membawa poster pengetahuan yang berisikan bermacam-macam informasi, mulai dari perilaku menjaga kebersihan, pendidikan karakter dan pola asuh kepada anak.

Upaya kami yang lain di bidang pendidikan yaitu menumbuhkan kembali kegiatan belajar mengajar PAUD oleh ibu-ibu di Puragi-Tawanggire. PAUD di wilayah tersebut sebenarnya sudah diinisiasi oleh Perusahaan sejak 2015, namun sempat terhenti karena tidak ada insentif bagi para ibu yang mengajar. Pada Februari 2016, tim penggerak mulai mendampingi ibu-ibu untuk aktif kembali di PAUD. Kegiatan ini didukung aparat kampung yang mengalokasikan sejumlah dana desa untuk membeli kebutuhan PAUD dan membayar honor ibu-ibu yang aktif mengajar.

Di Benawa dan Sumano, kami juga menumbuhkan kegiatan belajar mengajar PAUD. Berawal dari kelas informal anak-anak pada Februari 2016, tim penggerak melakukan pendekatan kepada orang tua. Setelah empat bulan belajar dan mengamati perkembangan anak-anak mereka, para orang tua yang rata-rata bekerja di perkebunan mulai kembali menyekolahkan anaknya. Saat ini terdapat kurang lebih 20 orang tua dari Benawa dan Sumano yang rutin mengantarkan anaknya untuk mengikuti kelas belajar.

Program yang kami jalankan bersama YILB memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Para orang tua mulai memahami pentingnya anak bersekolah dan mendidik anak, seperti memperkenalkan anak pada anggota tubuhnya, mengajarkan lagu yang membantu proses belajar anak dan berkomunikasi lebih baik kepada anak-anak mereka. Selain itu, orang tua juga mendampingi anak belajar dan memeriksa ulang hasil pekerjaan anak. Kami juga memantau bahwa diskusi-diskusi pendidikan tersebut juga berlanjut di rumah-rumah ibadah dengan kelompok masyarakat di kampung dan lainnya.

Pendampingan dan Pengembangan Kapasitas Aparat Kampung

Lebih jauh lagi, kami melihat konteks pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan juga mencakup pengembangan kapasitas bagi aparat kampung. Keberadaan mereka sangat strategis bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat dan oleh sebab itu perlu memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup.

Sejak November 2016, tim penggerak YILB mendampingi aparat Kampung Kais-Tapuri, Puragi-Tawanggire, Benawa 1-Kauri, Saga, Ikana-Mukamat serta Kampung Makaroro. Pendampingan kami lakukan dalam hal administrasi dan penyusunan alokasi dana desa (ADD) agar mereka lebih memahami kebutuhan masyarakat. Selain itu, kami juga mendorong mereka untuk lebih intensif berkomunikasi dua arah dengan masyarakat.

Kini, aparat kampung mengadakan rapat dengan masyarakat setiap bulan untuk membahas permasalahan dan kondisi yang ada di kampung masing-masing. Diskusi mengenai pendidikan dilakukan di Kampung Benawa 1-Kauri

dan Saga. Diskusi mengenai kegiatan pengembangan masyarakat seperti PKK, PAUD dan kelompok tani mulai bergulir di Kampung Puragi-Tawanggire, Makororo dan Kais-Tapuri.

Lebih jauh lagi, mereka juga sudah mulai memahami pentingnya administrasi desa. Di Ikana-Mukamat misalnya, mereka meminta pelatihan di bidang informasi teknologi agar dapat melakukan pekerjaan administrasi dengan lebih baik dan cepat. Lebih dari itu, mereka juga sudah memasukkan anggaran pembelian komputer dan printer dalam Anggaran Dana Desa tahun 2017.



Apolos Sewa

Ketua Dewan Adat Wilayah Kepala Burung di Sorong, Papua Barat

Kami sudah pernah menyampaikan bahwa selama ini Dewan Adat selalu mengamati setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak Perusahaan. Terkait dengan aspirasi masyarakat, kami melihat Perusahaan sudah menjawab satu per satu dan kami mengharapkan agar segera diselesaikan.

Selama ini kami melihat belum ada masalah yang menunjukkan Perusahaan tidak menghargai adat istiadat yang sangat fatal, mungkin ada kesalahan tapi masih bisa dibilang sangat kecil. Upacara adat pada saat pembukaan lahan baru, dukungan untuk lembaga adat dan lainnya dilakukan.

Kami juga melihat adanya keterbukaan dengan masyarakat yang dapat mendengar langsung dari pimpinan Perusahaan. Untuk selanjutnya, kami berharap Perusahaan memberi prioritas pada orang asli Papua untuk masalah tenaga kerja. Masalah tapal batas antar suku perlu ditindaklanjuti segera, termasuk hak-hak masyarakat terkait ganti rugi dan hal-hal lainnya yang tertunda.



Dominggos Aifufu

Kepala Suku Besar IMEKKO di Sorong Selatan, Papua Barat

Menurut kami, kalau Perusahaan tidak punya niat, pasti sudah lama Perusahaan tutup tetapi karena Perusahaan punya niat baik maka masih bertahan sampai saat ini.

Kami rasa Perusahaan sudah menghormati kebiasaan dan adat istiadat lokal. Kalau ada kekurangan, secara bertahap Perusahaan melengkapi. Sejak awal masuk, Perusahaan melibatkan kami sebagai tokoh adat, artinya Perusahaan menghargai adat.

Pesan kami, Perusahaan supaya selalu melihat masyarakat dan membantu mereka untuk lebih baik lagi. Demikian juga untuk tenaga kerja, supaya memprioritaskan tenaga lokal agar tidak ada pengangguran di Imekko.

KEBIJAKAN BERKELANJUTAN

Pernyataan Komitmen

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (PT ANJ Tbk) adalah perusahaan perkebunan yang bergerak di bidang kelapa sawit, tepung sagu, edamame dan produksi biogas. Kami berkomitmen terhadap pengembangan bertanggung jawab dengan tujuan menghasilkan produk berkualitas tinggi yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Tujuan itu kami capai melalui praktik-praktik manajemen terbaik berdasarkan keseimbangan tiga pilar kebijakan kami: **Pengelolaan Lingkungan, Kebijakan Usaha dan Tanggung Jawab Sosial**.

Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini berlaku untuk PT ANJ Tbk dan seluruh anak perusahaannya. Kami mengharapkan para mitra bisnis kami untuk menghormati dan mematuhi komitmen kami. PT ANJ Tbk juga berkomitmen terhadap Prinsip dan Kriteria yang ditetapkan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), serta standar keberlanjutan nasional dan global lainnya. Pilar utama dari Kebijakan Keberlanjutan kami adalah sebagai berikut:

Pilar Kebijakan Keberlanjutan

A. Pengelolaan Lingkungan

I. Manajemen Lingkungan

Manajemen Lingkungan terkait dengan pelestarian ekologi tata ruang wilayah, termasuk:

- Konservasi hutan primer dan pemanfaatan hutan sekunder untuk meningkatkan pembangunan pedesaan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional
- Komitmen mengurangi efek Gas Rumah Kaca (GRK) dan menjaga areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value/HCV*) dan Nilai Karbon Tinggi (*High Carbon Stock/HCS*)
- Tidak ada pengembangan di lahan gambut dan lahan basah
- Tidak ada pembakaran untuk pembukaan lahan
- Penerapan pendekatan kehati-hatian dalam membuka lahan rentan, lereng dan jalan air (termasuk sempadan sungai)

II. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan Berkelanjutan harus memenuhi kebutuhan lingkungan, sosial dan ekonomi di masa kini, namun juga memastikan bahwa produktivitas di masa datang dapat dipertahankan. Komitmen ANJ terhadap pembangunan berkelanjutan dinyatakan sebagai berikut:

- Pendekatan pengembangan area yang memperhatikan keseimbangan kebutuhan sosial, lingkungan dan ekonomi
- Pengembangan wilayah baru yang bertanggung jawab yang mengintegrasikan pendekatan tata ruang

III. Praktik-praktik Terbaik

Praktik-praktik Terbaik adalah prosedur operasional yang menjadi tolok ukur pembuatan dan implementasi standar-standar manajemen. Prosedur-prosedur tersebut berlaku untuk:

- Implementasi Manajemen Hama Terpadu
- Pengelolaan air di lahan gambut dan lahan basah
- Pengelolaan limbah yang mendorong pengurangan, penggunaan kembali dan pendaurulangan
- Penggunaan bahan kimia secara bertanggung jawab dan penggunaan paraquat secara terbatas
- Pengurangan polusi

B. Kebijakan Usaha

I. Kelayakan Ekonomi merujuk pada kemampuan dan kapasitas perusahaan untuk memperoleh imbal hasil yang wajar dan berkelanjutan.

- Berkomitmen terhadap tata kelola perusahaan
- Menjamin produk berkualitas tinggi

II. Praktik-praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab

Praktik-praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab mewajibkan perusahaan untuk mempertimbangkan faktor etika, lingkungan dan sosial dalam upaya meraih keuntungan.

- Ketaatan terhadap Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia serta konvensi internasional
- Memastikan pelaksanaan Kode Etik

C. Tanggung Jawab Sosial

I. Kesetaraan gender

Kesetaraan Gender memastikan bahwa seluruh karyawan dan pihak terkait menerima perlakuan yang sama dan tidak mengalami diskriminasi berdasarkan gender. PT ANJ Tbk akan mempromosikan kesetaraan gender di dalam perusahaan dan seluruh mitra usahanya.

- Pemberdayaan Perempuan
 - Hak terhadap pengasuhan anak dan reproduksi
 - Kesehatan perempuan
- Kesempatan Setara
 - Upah dan bonus yang adil dan kesempatan yang sama untuk peningkatan kemampuan

II. Hak-hak Asasi Manusia

Hak-hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada hak dasar yang harus dihormati seluruh manusia berdasarkan prinsip-prinsip dan norma-norma universal.

- Hak-hak anak
- Tidak ada kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual
- Tidak ada toleransi terhadap diskriminasi berdasarkan suku, agama, kebangsaan, pandangan politik, kondisi fisik dan lain-lain
- Hak-hak Pekerja
 - Tidak ada pekerja anak-anak atau pekerja paksa
 - Kondisi dan tunjangan kerja
- Hak masyarakat atas tanah dan hak ulayat
- Mekanisme Penanganan Keluhan

III. Keselamatan dan Keamanan

- Keselamatan dan Keamanan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga karyawan dapat bekerja tanpa risiko cedera atau sakit.
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

IV. Tanggung Jawab Sosial

PT ANJ Tbk memandang masyarakat sebagai mitra setara dan berkomitmen untuk bersama para pemangku kepentingan mengelola secara aktif risiko sosial yang terkait operasinya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aktivitas yang memperbaiki kesejahteraan dan kehidupan masyarakat. Aktivitas ini termasuk pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

PT ANJ Tbk berkomitmen untuk menerapkan pendekatan adaptif dalam pelaksanaan kebijakan ini, termasuk Komitmen untuk Perbaikan Berkesinambungan melalui pembaruan secara periodik, kajian dan penggunaan teknologi baru untuk memperbaiki tiga pilar kebijakan ini. ANJ juga menerapkan Transparansi Perusahaan dan berkomitmen untuk memberikan informasi yang tepat kepada pemangku kepentingan yang relevan terkait isu lingkungan, sosial dan legal melalui proses konsultasi sehingga memungkinkan pelacakan produk dan rantai pasok ANJ.

Referensi Silang Indeks Isi GRI G4

Pengungkapan Hal Umum		
Indikator	Uraian	Halaman
Strategi dan Analisis		
G4-1	Pernyataan dari Direksi	3
Profil Organisasi		
G4-3	Nama Organisasi	15
G4-4	Merek, Produk, dan Layanan Jasa	15
G4-5	Lokasi Kantor Pusat	15
G4-6	Jumlah Negara Tempat Beroperasi	16, 17
G4-7	Kepemilikan Saham dan Bentuk Hukum	15
G4-8	Pasar Terlayani	15, 16
G4-9	Skala Organisasi	16
G4-10	Jumlah dan Komposisi Pegawai	25
G4-11	Pekerja Terlindungi Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	53
G4-12	Rantai Pasokan Organisasi	67, 68
G4-13	Perubahan Signifikan Organisasi	17
G4-14	Pendekatan Pencegahan Melalui Manajemen Risiko	23
G4-15	Kepatuhan Pada Prinsip-prinsip dan Inisiatif Eksternal	8, 16, 21
G4-16	Keanggotaan Dalam Asosiasi	23
Aspek Material dan Batasan		
G4-17	Daftar Entitas	8
G4-18	Proses Menentukan Isi Laporan dan Pembatasan	9
G4-19	Daftar Aspek Material	11
G4-20	Batasan Aspek Material di Dalam Organisasi	11
G4-21	Batasan Aspek Material di Luar Organisasi	11
G4-22	Pernyataan Kembali	11
G4-23	Perubahan Pelaporan Bersifat Signifikan	11
Pelibatan Pemangku Kepentingan		
G4-24	Daftar Pemangku Kepentingan	47
G4-25	Dasar Identifikasi dan Seleksi Pemangku Kepentingan	47
G4-26	Proses Pendekatan pada Pemangku Kepentingan	47
G4-27	Topik Kunci dan Respon Organisasi	47
Profil Pelaporan		
G4-28	Periode Pelaporan	7
G4-29	Tanggal Penerbitan Laporan Terdahulu	7
G4-30	Siklus Pelaporan	7
G4-31	Kontak	11
G4-32	Indeks Isi GRI	8
G4-33	Penjaminan	8

Tata Kelola			
G4-34		Struktur Tata Kelola	20
Etika dan Integritas			
G4-56		Nilai-nilai, Prinsip, dan Norma Organisasi	12
Pengungkapan Hal Khusus			
Aspek Material	DMA* dan Indikator	Uraian	Halaman
Kinerja Ekonomi			
Kinerja Ekonomi	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen	69
	G4-EC1	Nilai Ekonomi Langsung Dihasilkan dan Didistribusikan	72
	G4-EC4	Bantuan Finansial dari Pemerintah	72
Sumber Daya Manusia			
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen	54
	G4-LA6	Jenis dan Tingkat Kecelakaan Kerja	57, 58
	G4-LA7	Pekerja dengan Risiko Tinggi Kesehatan Kerja	55
Lingkungan			
Emisi	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen	43
	G4-EN15	Emisi Gas Rumah Kaca Langsung (GRK) (Scope 1)	44
	G4-EN18	Intensitas Emisi GRK	44
Efluen dan Limbah	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen	41
Kemasyarakatan			
Masyarakat Lokal	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen	59
	G4-SO1	Operasional Perusahaan dan Pengembangan Masyarakat Lokal	46, 61
Hak Asasi Manusia			
Pekerja Anak	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen	52
	G4-HR5	Pekerja Anak	52
Pencegahan	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen	52
Pemaksaan Bekerja	G4-HR6	Kerja Paksa	52
Petugas Keamanan Berserikat HAM	G4-HR7	Tenaga Keamanan Terlatih HAM	52
Hak Penduduk Asli	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen	50

*DMA = Disclosure on Management Approach /Pengungkapan oleh Manajemen



LEMBAR UMPAN BALIK

Pemangku kepentingan yang terhormat,

Kami mohon kesediaan Anda untuk memberikan umpan balik setelah membaca Laporan Keberlanjutan ini dengan mengirim formulir ini melalui fax, kurir atau pos. Anda dapat juga mengirim formulir melalui e-mail setelah mengubahnya ke format digital (*scan*).

Nama (bila berkenan) :

Institusi/Perusahaan :

E-mail :

Telepon/HP :

Kelompok pemangku kepentingan :

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Pemerintah | <input type="checkbox"/> Media | <input type="checkbox"/> Industri | <input type="checkbox"/> Lembaga Pendidikan |
| <input type="checkbox"/> Masyarakat | <input type="checkbox"/> Perusahaan | <input type="checkbox"/> LSM | <input type="checkbox"/> Lain-lain, mohon sebutkan |

Pilih jawaban yang paling sesuai dengan memberi tanda "X" pada kotak yang disediakan.

1. Laporan ini sudah menggambarkan kinerja perusahaan dalam pembangunan keberlanjutan

- Setuju Netral Tidak Setuju

2. Laporan ini meningkatkan kepercayaan Anda pada komitmen dan implementasi keberlanjutan perusahaan.

- Setuju Netral Tidak Setuju

3. Laporan ini menarik dan mudah dipahami.

- Setuju Netral Tidak Setuju

4. Urutkan aspek material yang paling penting bagi Anda:

(nilai 1=paling penting s/d 5=paling tidak penting)

- Pengelolaan lingkungan ()
- Komunitas lokal ()
- Lacak balik ()
- Sertifikasi terkait aspek keberlanjutan ()
- Kinerja ekonomi ()
- Kesehatan dan Keselamatan Kerja ()

5. Apakah Anda berkeinginan menerima dan membaca laporan-laporan sejenis dari kami?

- Ya Tidak

6. Saran/usul/komentar Anda atas laporan ini:

Silakan mengirimkan lembar umpan balik ini kepada kami:

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk
Corporate Communications
Atrium Mulia Lantai 3A, Suite 3A-02
Jl. H. R. Rasuna Said Kav B10-11
Jakarta 12910 - Indonesia

Telepon : +6221 2965 1777
Fax : +6221 2965 1788
Email : anj.corcomm@anj-group.com

